



Katalog BPS : 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA MEI 2013



Badan Pusat Statistik



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA MEI 2013



Badan Pusat Statistik

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Mei 2013

ISSN. 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1307

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xv + 103 halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan IV (November) tahun 2012, Triwulan I (Februari) dan Triwulan II (Mei) tahun 2013. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, September 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	49
5.	Indikator Pengangguran	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013 ...	26
Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013	30
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013	31
Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)	34
Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013	35
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)	38
Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013	39
Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2012–2013 (persen)	42
Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013	46
Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2012–2013 (dalam juta)	50
Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2012–2013	50
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2012–2013 (persen)	53
Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2012–2013	57
Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)	60
Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	62
Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2012–2013 (dalam juta)	64
Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2012–2013	65
Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	67
Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2012–2013	68
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013 (persen)	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2013	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Mei 2013	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Februari dan Mei 2013	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Mei 2013	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Mei 2013	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2013	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2013 (persen)	70
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Mei 2013	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	77
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013 (dalam juta)	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2012–2013 (dalam juta)	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2012–2013	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2012–2013	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2012–2013	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013	95
Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2012–2013 (dalam ribu)	96

Lampiran 18.Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	97
Lampiran 19.Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013	98
Lampiran 20.Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (rupiah)	99
Lampiran 21.Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013 (rupiah)	100
Lampiran 22.Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (rupiah)	101
Lampiran 23.Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013 (rupiah)	102
Lampiran 24.Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 mencapai 121,66 juta orang, secara absolut naik sebanyak 470 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 (121,19 juta orang) dan naik sebanyak 1,29 juta orang dibandingkan keadaan November 2012 (120,37 juta orang). Sementara TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) mengalami kenaikan dari 69,21 persen pada Februari 2013 menjadi 69,26 persen pada Mei 2013.

Secara nasional, rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) pada Mei 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, yaitu sebesar 0,11 poin dari angka 65,12 pada Februari 2013 menjadi 65,23 pada Mei 2013. Angka ini bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sebanyak 65 orang yang bekerja pada Mei 2013. Jika dibandingkan keadaan November 2012, EPR Sakernas Mei 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin dari angka 64,97.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Mei 2013 ini tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Persentase terbesar masih diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang naik sebesar 0,29

persen poin dari 47,33 persen menjadi 47,62 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang juga naik sebesar 0,18 persen poin dari 36,45 persen menjadi 36,63 persen. Penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin dari 16,22 persen menjadi 15,75 persen.

Hasil Sakernas Mei 2013, memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,43 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 35,43 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,14 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Mei 2013 mencapai 19,61 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin dibanding Februari 2013 (19,43 persen), namun mengalami penurunan sebesar 2,29 persen poin dibanding November 2012 (21,90 persen). Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 19,61 persen pada Mei 2013 dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 20 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Hasil Sakernas Mei 2013 menunjukkan tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada

tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,78 persen dan 13,91 persen.

Merujuk pada hasil Sakernas baik pada November 2012, Februari dan Mei 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Mei 2013 mencapai 32,62 persen atau mengalami penurunan tipis yaitu sebesar 0,72 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2013 (33,34 persen), namun mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (33,15 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013, dari 114,59 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,56 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,38 juta orang). Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada November 2012 sebesar 53,49 persen, turun tipis menjadi 53,48 persen pada Februari 2013, dan naik menjadi 53,56 persen pada Mei 2013. Sementara persentase sektor formal pada November 2012 mencapai 46,51 persen, lalu sedikit meningkat menjadi 46,52 persen pada Februari 2013, dan turun menjadi 46,44 persen pada Mei 2013.

Berdasarkan hasil Sakernas pada November 2012, Februari dan Mei 2013, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Indonesia

menunjukkan sedikit fluktuasi. TPT pada Mei 2013 sebesar 5,81 persen, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Februari 2013 (5,92 persen), namun mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan November 2012 (5,79 persen). TPT sebesar 5,81 persen dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur.

TPT penduduk pada kelompok umur muda berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 adalah sebesar 18,02 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 0,49 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2013 (17,53 persen), dan naik sebesar 0,43 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (17,59 persen).

Sakernas Mei 2013 menunjukkan bahwa secara umum TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,33 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok “tidak pernah sekolah” atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,34 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2013 mencapai 13,07 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari sejumlah

7,36 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 5,71 juta orang adalah perempuan. Sedangkan berdasarkan perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Mei 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 9,12 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,95 juta orang.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2013 adalah 30,74 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,74 persen.

Jika dibandingkan dengan Februari 2013, tingkat ketidakaktifan pada Mei 2013 hanya mengalami penurunan sangat tipis, yaitu sebesar 0,05 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 menurun sebesar 0,30 persen poin.

Secara nasional hasil Sakernas Mei 2013 tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan Sakernas pada Februari 2013. Angkatan kerja pada Mei 2013 ini masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,31 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,47 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,89 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,33 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan

I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Februari 2013, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Mei 2013.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas sederhana, mudah

dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang

produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era

globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak

aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan,

misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisa apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat

terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja

dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

2. PENJELASAN TEKNIS

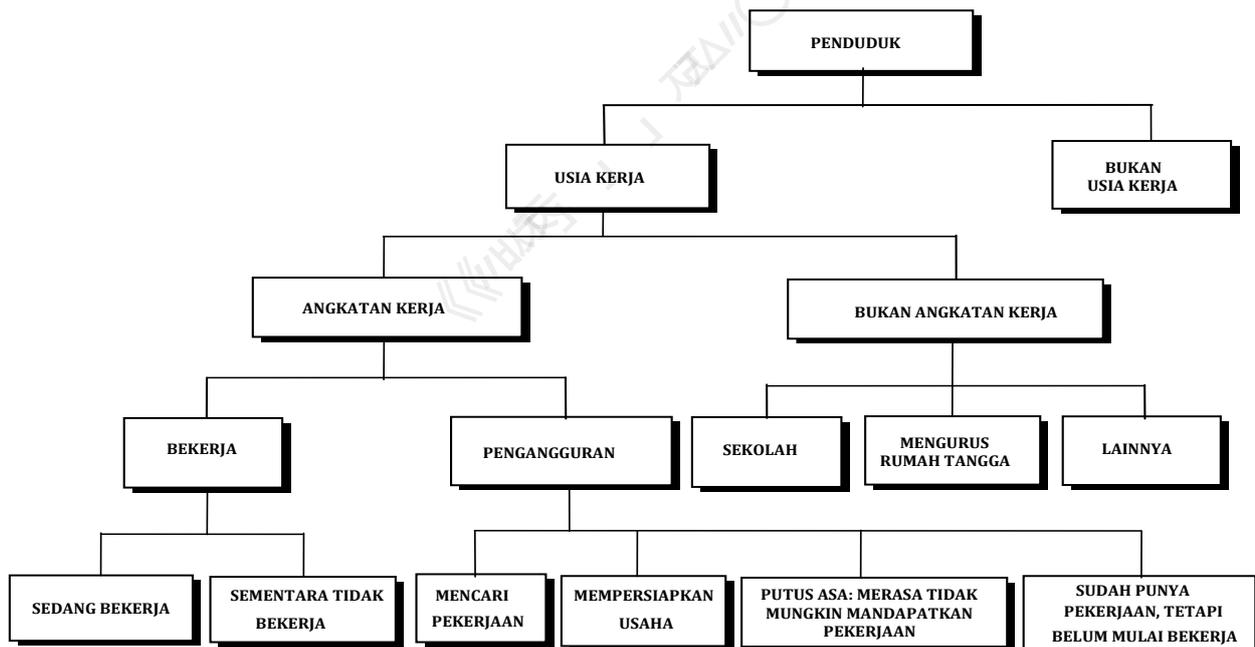
Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumur,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut

digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun keatas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam Keatas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Konferensi Internasional Stasisi Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (*UNDEREMPLOYMENT*), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada

kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika

diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga

perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada

wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴⁾, dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/ upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 mencapai 121,66 juta orang, secara absolut naik sebanyak 470 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 (121,19 juta orang) dan naik sebanyak 1,29 juta orang dibandingkan keadaan November 2012 (120,37 juta orang), lihat Lampiran 3.

Persentase TPAK mengalami kenaikan dari 69,21 persen pada Februari 2013 menjadi 69,26 persen pada Mei 2013, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Mei 2013 naik tipis sebesar 0,05 persen poin. Jika dibandingkan dengan kondisi November 2012, TPAK Mei 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen poin.

Pada November 2012 dan Februari maupun Mei 2013, TPAK jenis kelamin laki-laki selalu jauh lebih tinggi dibanding TPAK jenis kelamin perempuan. Sebagai gambaran pada Mei 2013, TPAK laki-laki mencapai 85,31 persen sementara pada perempuan hanya 53,26 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sejumlah 85 orang,

sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja hanya sebanyak 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Pada periode Februari 2013–Mei 2013, TPAK laki-laki naik 0,19 persen poin sedangkan TPAK perempuan turun 0,10 persen poin. Sementara jika dibandingkan dengan keadaan November 2012, TPAK untuk laki-laki turun tipis sebesar 0,01 persen poin dan TPAK perempuan naik sebesar 0,59 persen poin.

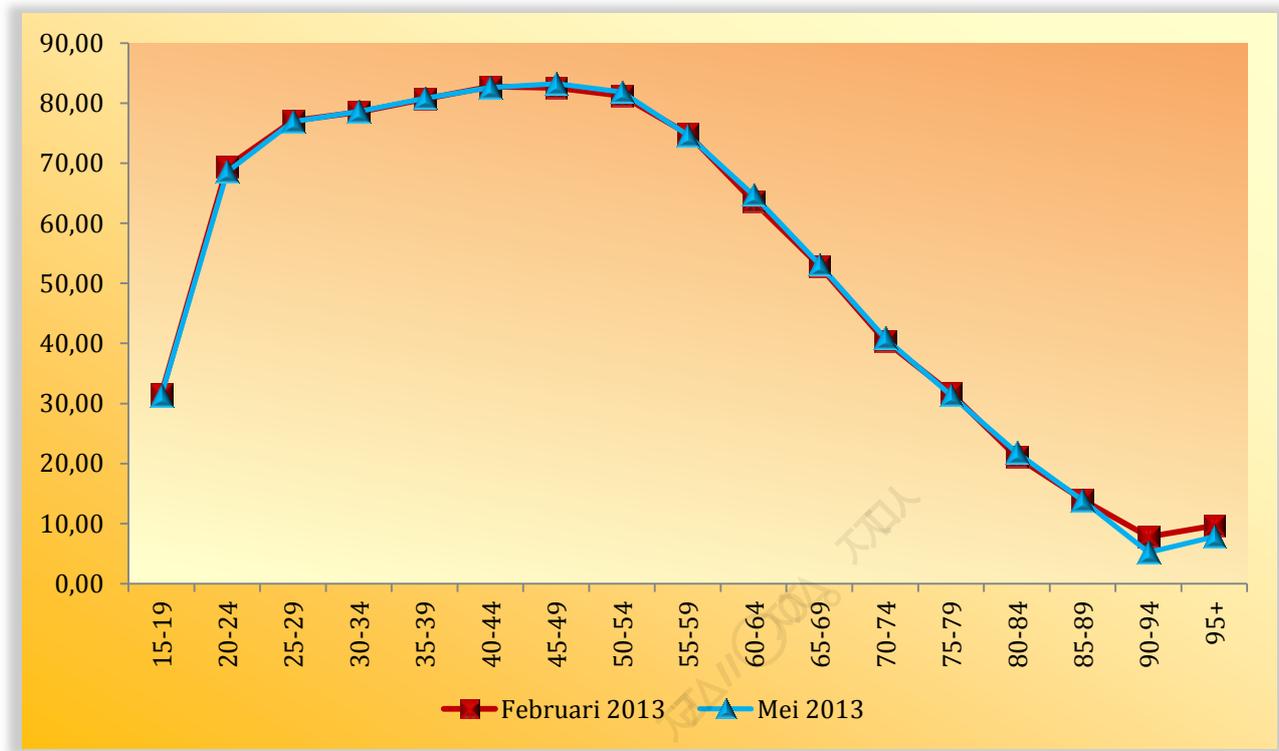
Pada periode Februari 2013–Mei 2013, kenaikan terbesar persentase TPAK menurut kelompok umur berada pada kelompok umur 65 tahun keatas, yaitu naik sebesar 0,33 persen poin sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah kelompok umur 15–24 tahun yaitu sebesar 0,52 persen poin (Tabel 1).

Grafik 1 menunjukkan bahwa pola TPAK menurut kelompok umur antara keadaan Februari 2013 dan Mei 2013 berhimpitan, artinya keadaan TPAK menurut kelompok umur pada Februari 2013 tidak begitu berbeda jauh dibandingkan keadaan Mei 2013, pergeseran yang agak mencolok hanya terjadi pada kelompok umur 90–94 tahun dan 95+.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(persen)

Kelompok Umur	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	68,96	69,21	69,26
Laki-laki	85,32	85,12	85,31
Perempuan	52,67	53,36	53,26
Perkotaan	67,12	66,96	67,38
Perdesaan	70,82	71,48	71,21
(15–24)	50,39	50,01	49,49
Laki-laki	60,91	60,85	60,21
Perempuan	39,75	39,04	38,65
Perkotaan	48,98	48,71	48,23
Perdesaan	51,80	51,31	50,86
(15–64)	71,15	71,38	71,36
Laki-laki	87,22	87,07	87,08
Perempuan	54,87	55,49	55,43
Perkotaan	69,59	69,40	69,61
Perdesaan	72,74	73,39	73,20
(25–54)	79,54	80,15	80,30
Laki-laki	97,84	97,73	98,04
Perempuan	61,04	62,38	62,35
Perkotaan	78,57	78,63	79,24
Perdesaan	80,52	81,70	81,42
(25–34)	77,01	77,77	77,73
Laki-laki	97,38	97,17	97,39
Perempuan	56,60	58,33	58,03
Perkotaan	77,27	77,61	78,11
Perdesaan	76,73	77,93	77,29
(35–54)	81,26	81,77	82,05
Laki-laki	98,15	98,11	98,48
Perempuan	64,08	65,16	65,32
Perkotaan	79,47	79,33	80,04
Perdesaan	83,08	84,24	84,10
(55–64)	70,76	70,02	70,27
Laki-laki	86,83	86,12	85,91
Perempuan	54,15	53,41	54,05
Perkotaan	64,12	62,50	62,93
Perdesaan	77,51	77,71	77,14
65 Tahun keatas	39,15	39,55	39,88
Laki-laki	55,76	54,88	57,02
Perempuan	25,97	27,36	26,40
Perkotaan	32,18	32,13	31,81
Perdesaan	45,68	46,46	46,48

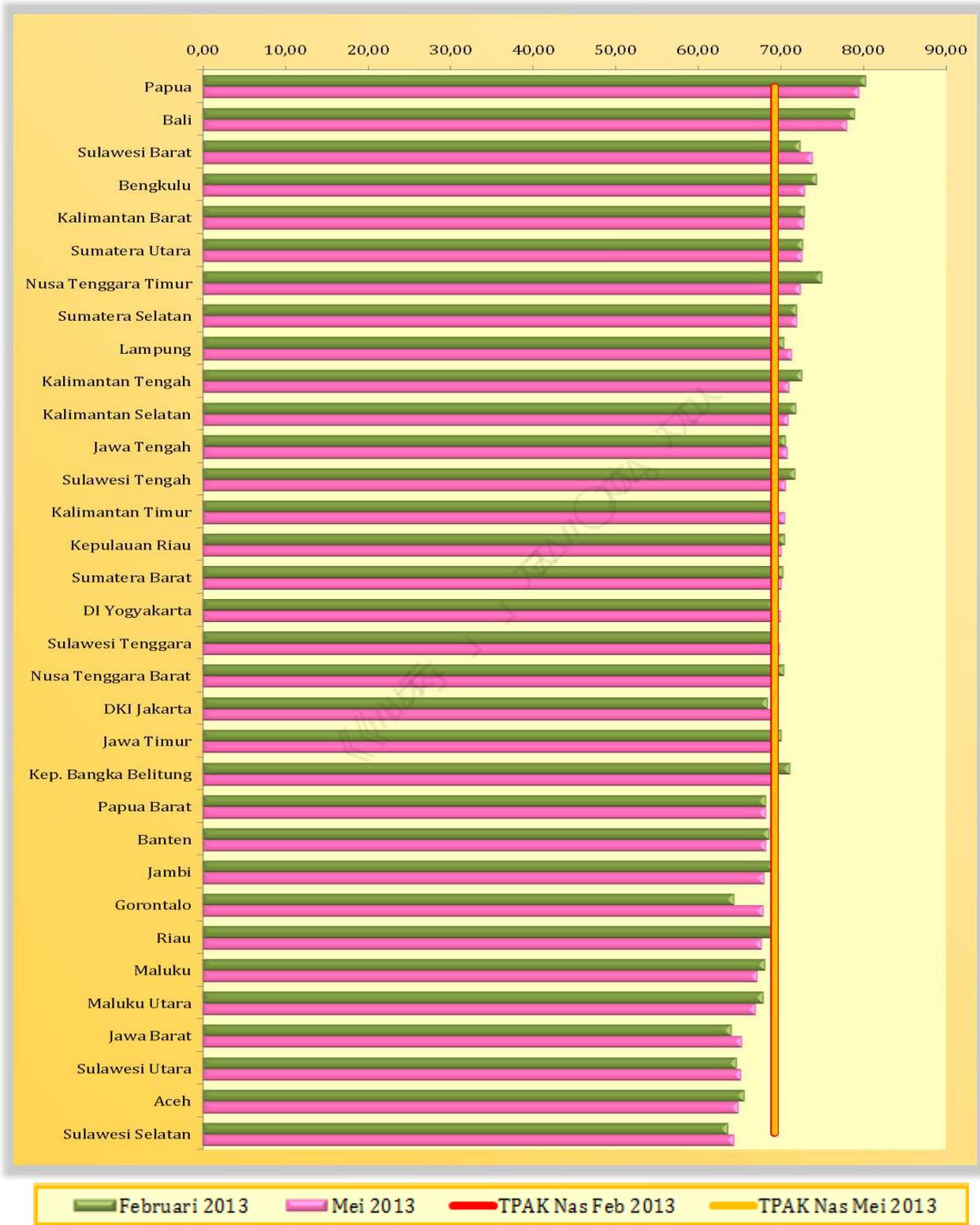
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013
(persen)



Provinsi dengan TPAK tertinggi menurut Sakernas Mei 2013 berturut-turut adalah Provinsi Papua (79,45 persen), Provinsi Bali (78,03 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (73,84 persen). Kondisi ini mirip dengan hasil Sakernas Februari 2013, dimana tiga provinsi tertinggi diduduki oleh Provinsi Papua (80,25 persen), Provinsi Bali (78,91 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (74,95 persen). Untuk provinsi dengan TPAK terendah pada

Sakernas Mei 2013 berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Selatan (64,31 persen), Provinsi Aceh (64,84 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (65,23 persen). Urutan tiga provinsi dengan TPAK terendah agak berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, dimana posisi ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (63,58), Provinsi Jawa Barat (64,01) dan Provinsi Gorontalo (64,33) (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013
(persen)



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

Secara nasional, angka EPR pada Mei 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, yaitu sebesar 0,11 poin dari angka 65,12 pada Februari 2013 menjadi 65,23 pada Mei 2013. Angka ini bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sebanyak 65 orang yang bekerja pada Mei 2013. Jika dibandingkan keadaan November 2012, EPR Sakernas Mei 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin dari angka 64,97.

Dilihat dari jenis kelamin, EPR laki-laki pada periode Februari 2013–Mei 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,31 poin, sedangkan EPR perempuan mengalami penurunan sebesar 0,07 poin. Sementara jika dibandingkan dengan periode November 2012–Mei 2013, EPR untuk laki-laki menurun sebesar 0,32 poin, akan tetapi EPR perempuan meningkat sebesar 0,84 poin.

Berdasarkan daerah kota-desa, EPR daerah perkotaan pada periode Februari 2013–

Mei 2013 naik 0,48 poin dari angka 62,08 menjadi 62,56. Sedangkan daerah perdesaan turun 0,18 poin dari angka 68,18 menjadi 68,00 pada Mei 2013.

Untuk penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode November 2012–Mei 2013 maupun pada periode Februari 2013–Mei 2013 EPR mengalami penurunan masing-masing turun sebesar 0,96 poin dan 0,67 poin.

Untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), pada periode November 2012–Mei 2013, mengalami kenaikan EPR sebesar 0,65 poin, yaitu dari angka 72,44 pada November 2012 naik menjadi 73,09 pada Mei 2013. Sementara pada periode Februari 2013–Mei 2013 EPR pada kelompok ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,37 poin dari angka 72,72 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur (1)	2012	2013	
	November (2)	Februari (3)	Mei (4)
Umur 15 Tahun keatas	174,54	175,10	175,66
Laki-laki	87,12	87,40	87,68
Perempuan	87,42	87,70	87,97
Perkotaan	87,61	87,90	89,33
Perdesaan	86,93	87,20	86,32
Umur Muda (15–24)	42,17	42,31	42,45
Laki-laki	21,21	21,28	21,35
Perempuan	20,96	21,03	21,10
Perkotaan	21,08	21,15	22,12
Perdesaan	21,09	21,16	20,33
Umur Dewasa (25+)	132,37	132,79	133,20
Laki-laki	65,91	66,12	66,33
Perempuan	66,46	66,67	66,87
Perkotaan	66,53	66,74	67,21
Perdesaan	65,84	66,05	65,99
Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja	113,40	114,02	114,59
Laki-laki	70,52	70,21	70,70
Perempuan	42,88	43,81	43,89
Perkotaan	54,60	54,56	55,89
Perdesaan	58,80	59,46	58,70
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	17,51	17,45	17,22
Laki-laki	10,70	10,64	10,46
Perempuan	6,81	6,81	6,77
Perkotaan	8,34	8,23	8,60
Perdesaan	9,17	9,22	8,63
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	95,89	96,57	97,36
Laki-laki	59,82	59,56	60,24
Perempuan	36,08	37,01	37,12
Perkotaan	46,26	46,33	47,29
Perdesaan	49,63	50,24	50,07

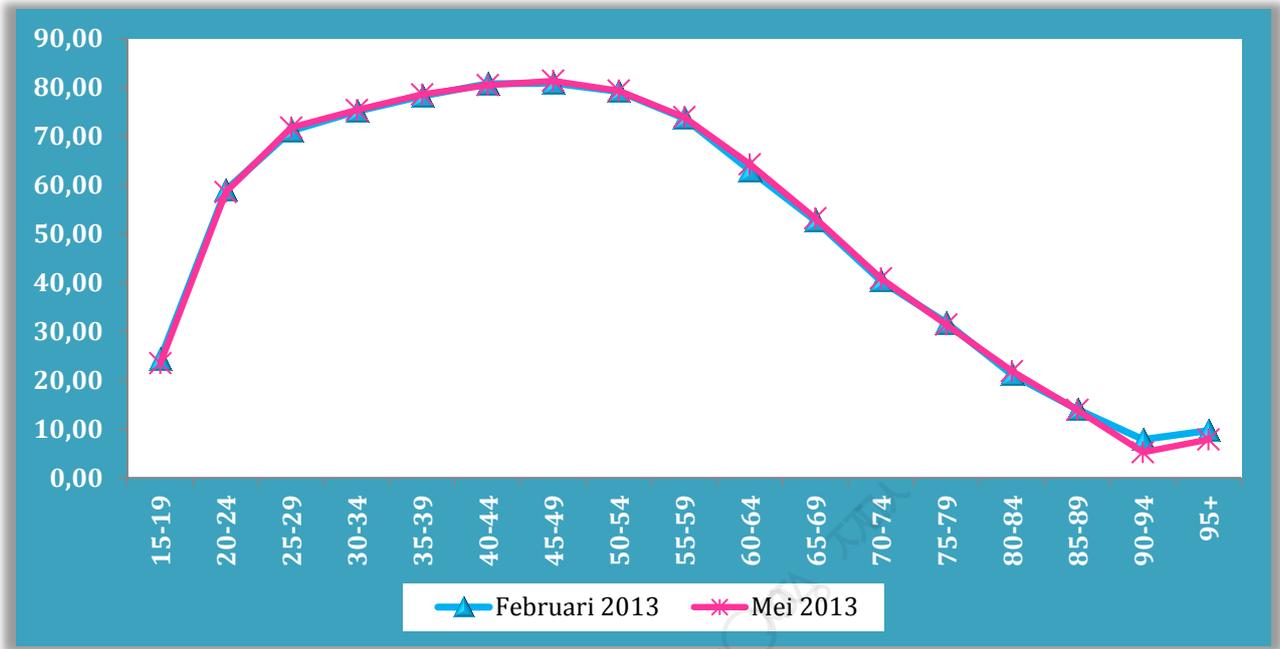
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013

Kelompok Umur	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	64,97	65,12	65,23
Laki-laki	80,95	80,32	80,63
Perempuan	49,05	49,96	49,89
Perkotaan	62,32	62,08	62,56
Perdesaan	67,64	68,18	68,00
Umur Muda (15–24)	41,53	41,24	40,57
Laki-laki	50,47	50,00	48,97
Perempuan	32,47	32,38	32,07
Perkotaan	39,56	38,91	38,85
Perdesaan	43,49	43,57	42,45
Umur Dewasa (25+)	72,44	72,72	73,09
Laki-laki	90,75	90,08	90,82
Perempuan	54,28	55,51	55,51
Perkotaan	69,54	69,42	70,36
Perdesaan	75,38	76,06	75,87

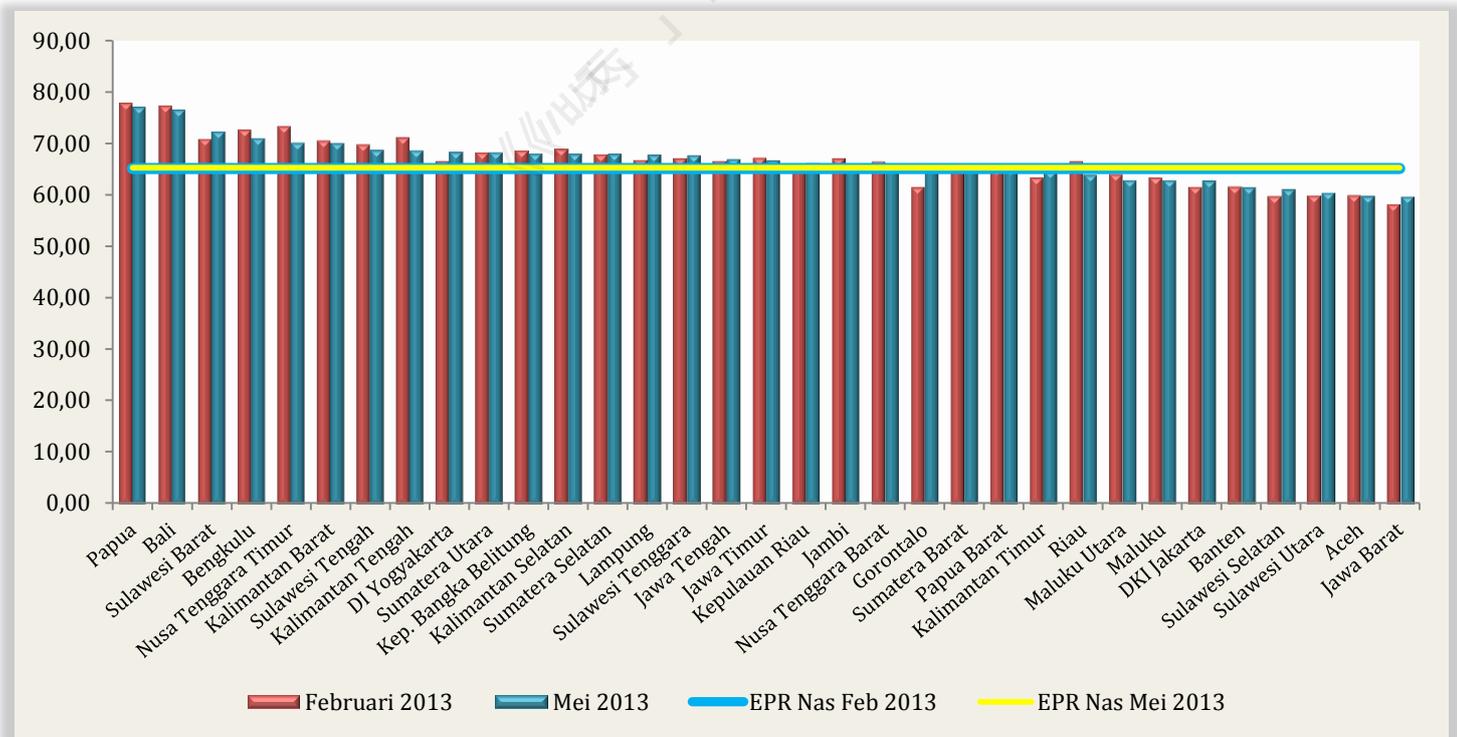
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR berada pada kelompok umur 45–49 tahun. Pada periode Februari dan Mei 2013 grafik EPR terlihat berhimpitan dan terlihat agak bergeser/merenggang pada kelompok umur 90–94 tahun dan 95 tahun keatas.

Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Mei 2013, urutan tiga provinsi tertinggi sama persis dengan urutan provinsi tertinggi untuk TPAK, yaitu Provinsi Papua (77,12), Bali (76,55) dan Sulawesi Barat (72,36). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Jawa Barat (59,73), Aceh (59,78), dan Sulawesi Utara (60,49).

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Mei 2013 ini tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Persentase terbesar masih diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang naik sebesar 0,29 persen poin dari 47,33 persen menjadi 47,62 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang juga naik sebesar 0,18 persen poin dari 36,45 persen menjadi 36,63 persen. Penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin dari 16,22 persen menjadi 15,75 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan pada periode November 2012–Mei 2013, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,10 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen poin, dan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06 persen poin.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada keadaan Mei 2013 mencapai 59,64 persen, atau dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja ada sekitar 60 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, persentase pekerja rentan mengalami

penurunan sebesar 0,38 persen poin, begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan November 2012, persentase pekerja rentan juga menurun sebesar 0,19 persen poin.

Pada keadaan Mei 2013 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan persentase pekerja rentan perempuan sebesar 64,04 persen, lebih tinggi dari persentase pekerja rentan laki-laki yang hanya sebesar 56,91 persen.

Persentase pekerja rentan menurut provinsi yang ada di Indonesia ditunjukkan pada Grafik 5. Pada keadaan Mei 2013, provinsi yang memiliki persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Papua (80,13 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (80,12 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (76,60 persen). Persentase pekerja rentan pada ketiga provinsi tersebut jauh di atas persentase rata-rata pekerja rentan untuk tingkat Nasional yang hanya sebesar 59,64 persen. Sementara itu, persentase pekerja rentan terendah pada Mei 2013 diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (26,83 persen), kemudian Provinsi Kepulauan Riau (30,97 persen) dan urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Banten (40,62 persen).

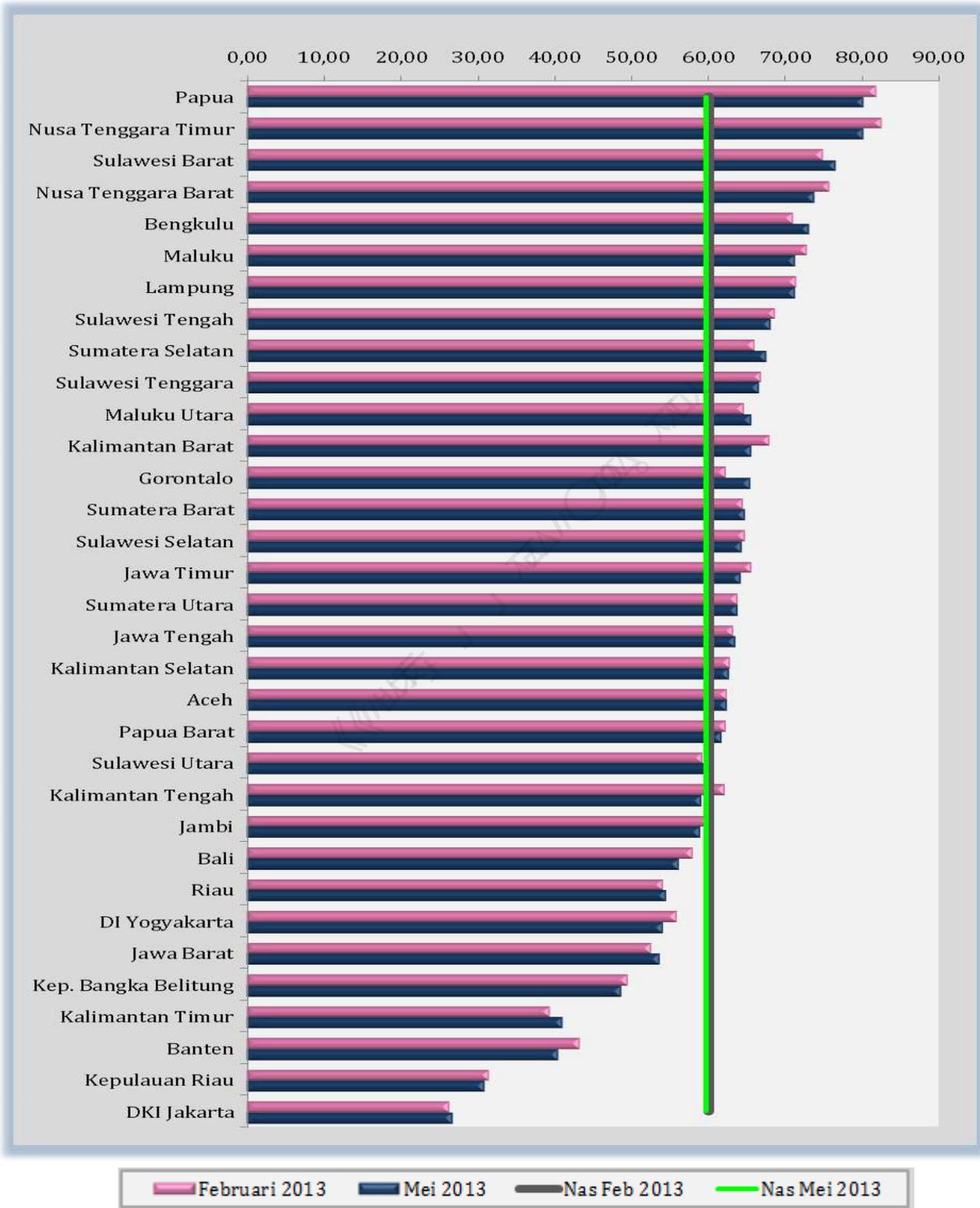
Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	113,40	114,02	114,59
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	41,36	41,56	41,98
Berusaha	54,11	53,97	54,56
Pengusaha	4,19	4,02	4,27
Berusaha sendiri	37,88	38,52	38,42
Pekerja bebas	12,04	11,43	11,87
Pekerja keluarga	17,93	18,49	18,05
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	67,85	68,44	68,34
Laki-laki	70,52	70,21	70,70
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	26,73	26,86	27,05
Berusaha	38,82	38,32	38,82
Pengusaha	3,36	3,24	3,41
Berusaha sendiri	26,13	26,37	26,42
Pekerja bebas	9,33	8,71	8,99
Pekerja keluarga	4,97	5,03	4,83
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	40,42	40,11	40,23
Perempuan	42,88	43,81	43,89
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	14,63	14,70	14,93
Berusaha	15,29	15,65	15,75
Pengusaha	0,83	0,78	0,85
Berusaha sendiri	11,76	12,15	12,01
Pekerja bebas	2,71	2,72	2,89
Pekerja keluarga	12,96	13,46	13,21
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	27,42	28,33	28,11

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,47	36,45	36,63
Berusaha	47,72	47,33	47,62
Pengusaha	3,70	3,53	3,73
Berusaha sendiri	33,41	33,78	33,53
Pekerja bebas	10,61	10,02	10,36
Pekerja keluarga	15,81	16,22	15,75
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	59,83	60,02	59,64
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	37,91	38,26	38,26
Berusaha	55,05	54,58	54,91
Pengusaha	4,77	4,61	4,83
Berusaha sendiri	37,05	37,56	37,37
Pekerja bebas	13,23	12,41	12,71
Pekerja keluarga	7,04	7,16	6,83
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	57,32	57,13	56,91
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	34,11	33,55	34,01
Berusaha	35,66	35,73	35,88
Pengusaha	1,94	1,79	1,95
Berusaha sendiri	27,41	27,74	27,35
Pekerja bebas	6,31	6,20	6,58
Pekerja keluarga	30,23	30,72	30,11
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	63,95	64,66	64,04

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Hasil Sakernas Mei 2013, memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,43 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 35,43 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,14 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa yaitu sebesar 21,40 persen, selain ditunjang oleh sektor jasa kemasyarakatan (15,89 persen), sektor transportasi (4,45 persen), dan sektor keuangan (2,69 persen). Sedangkan persentase sektor industri dan sektor bangunan menjadi penyumbang terbesar pada sektor manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,66 persen dan 5,85 persen.

Kontribusi sektoral hasil Sakernas Mei 2013 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, sektor jasa-jasa naik tipis sebesar 0,07 persen poin dari 44,36 persen. Sektor pertanian naik sebesar 0,38 persen poin dari 35,05 persen. Hanya sektor manufaktur yang mengalami penurunan yaitu sebesar 0,45 persen poin dari 20,59 persen. Pola perubahan ini tidak berbeda jika dibandingkan dengan keadaan November

2012, dimana sektor yang mengalami penurunan hanya sektor manufaktur yaitu sebesar 1,14 persen poin sedangkan sektor jasa-jasa dan sektor pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,09 persen poin dan 1,05 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Mei 2013 menurut provinsi menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian berturut-turut adalah Provinsi Papua (73,78 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (66,38 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (59,93 persen). Sementara itu, untuk sektor manufaktur persentase tertinggi pada Mei 2013 diduduki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (33,17 persen), Provinsi Kepri (32,19 persen) dan Provinsi Jawa Tengah (28,39 persen). Untuk sektor jasa-jasa pada keadaan Mei 2013 persentase tertinggi masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (81,19 persen), Provinsi Banten (57,31 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (56,12 persen).

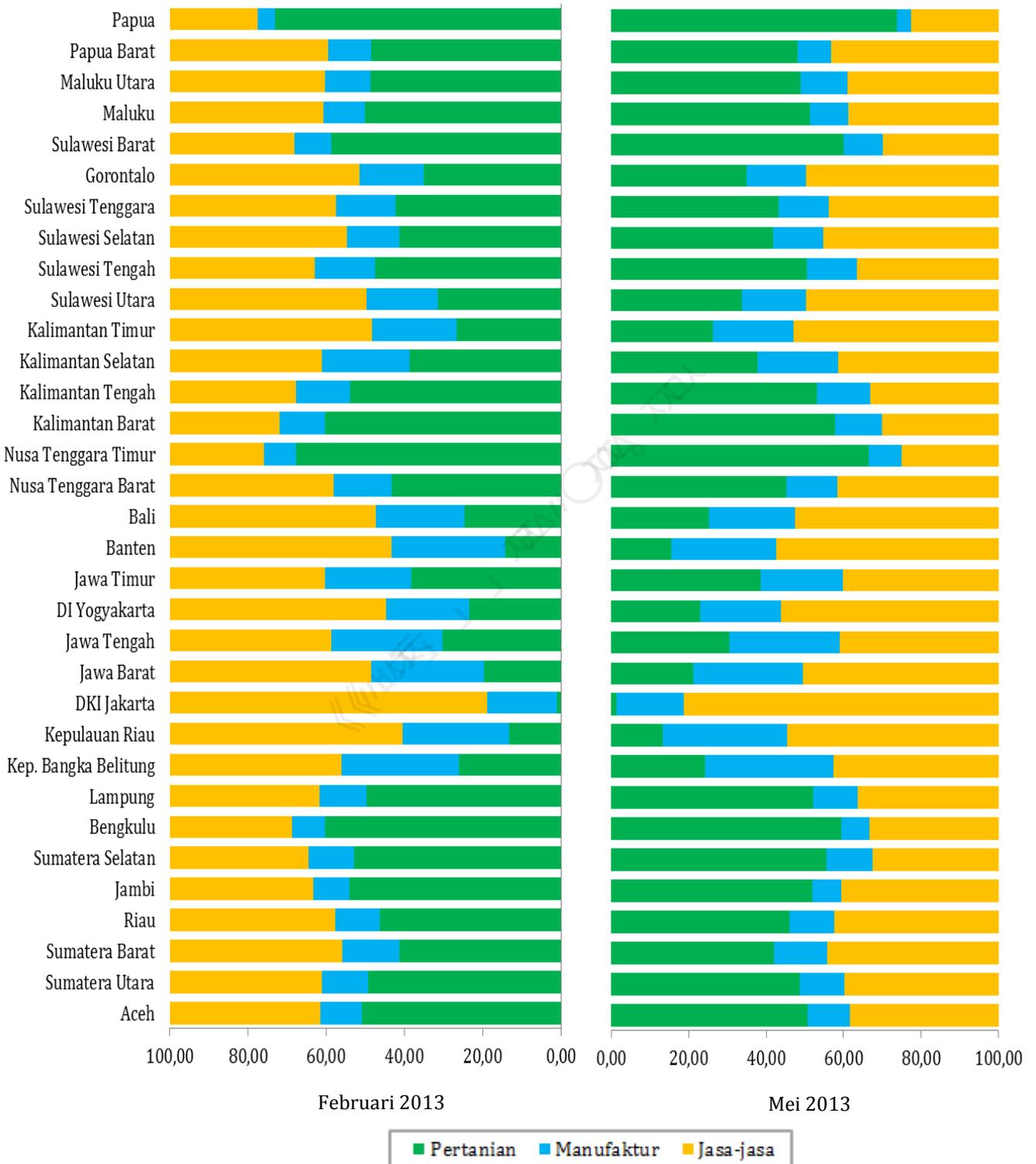
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	113,40	114,02	114,59
Pertanian	38,99	39,96	40,60
Manufaktur	24,12	23,48	23,08
Pertambangan	1,73	1,56	1,61
Industri	14,68	14,78	14,51
Listrik, gas dan air	0,25	0,25	0,26
Bangunan	7,46	6,89	6,71
Jasa-jasa	50,29	50,58	50,91
Perdagangan	24,71	24,81	24,53
Transportasi	5,28	5,23	5,09
Keuangan	2,92	3,01	3,09
Jasa kemasyarakatan	17,37	17,53	18,21
Laki-laki	70,52	70,21	70,70
Pertanian	24,69	24,94	25,48
Manufaktur	17,56	16,95	16,77
Pertambangan	1,54	1,41	1,44
Industri	8,50	8,58	8,57
Listrik, gas dan air	0,22	0,22	0,23
Bangunan	7,30	6,74	6,53
Jasa-jasa	28,28	28,32	28,45
Perdagangan	11,96	11,88	11,73
Transportasi	4,99	4,93	4,76
Keuangan	2,19	2,21	2,23
Jasa kemasyarakatan	9,14	9,30	9,73
Perempuan	42,88	43,81	43,89
Pertanian	14,31	15,02	15,12
Manufaktur	6,57	6,53	6,31
Pertambangan	0,19	0,14	0,17
Industri	6,18	6,21	5,94
Listrik, gas dan air	0,03	0,03	0,03
Bangunan	0,17	0,15	0,17
Jasa-jasa	22,01	22,26	22,46
Perdagangan	12,75	12,92	12,80
Transportasi	0,29	0,30	0,33
Keuangan	0,73	0,80	0,86
Jasa kemasyarakatan	8,24	8,24	8,47

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,38	35,05	35,43
Manufaktur	21,28	20,59	20,14
Pertambangan	1,53	1,36	1,40
Industri	12,95	12,97	12,66
Listrik, gas dan air	0,22	0,22	0,23
Bangunan	6,58	6,04	5,85
Jasa-jasa	44,34	44,36	44,43
Perdagangan	21,79	21,75	21,40
Transportasi	4,66	4,59	4,45
Keuangan	2,57	2,64	2,69
Jasa kemasyarakatan	15,32	15,38	15,89
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,00	35,52	36,04
Manufaktur	24,90	24,14	23,72
Pertambangan	2,19	2,01	2,04
Industri	12,05	12,22	12,12
Listrik, gas dan air	0,31	0,32	0,32
Bangunan	10,35	9,59	9,24
Jasa-jasa	40,10	40,34	40,24
Perdagangan	16,96	16,93	16,59
Transportasi	7,08	7,02	6,74
Keuangan	3,10	3,15	3,15
Jasa kemasyarakatan	12,96	13,24	13,76
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	33,36	34,28	34,44
Manufaktur	15,32	14,91	14,38
Pertambangan	0,44	0,33	0,38
Industri	14,42	14,17	13,53
Listrik, gas dan air	0,07	0,07	0,07
Bangunan	0,39	0,34	0,40
Jasa-jasa	51,32	50,81	51,18
Perdagangan	29,74	29,49	29,16
Transportasi	0,68	0,69	0,75
Keuangan	1,70	1,83	1,96
Jasa kemasyarakatan	19,20	18,80	19,31

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2013



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas, dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Mei 2013 mencapai 19,61 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin dibanding Februari 2013 (19,43 persen), namun mengalami penurunan sebesar 2,29 persen poin dibanding November 2012 (21,90 persen). Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 19,61 persen pada Mei 2013 dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 20 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Hasil Sakernas Mei 2013 menunjukkan tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,78 persen dan 13,91 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, tingkat pekerja paruh waktu

perempuan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,06 persen poin (dari 28,72 persen menjadi 28,78 persen). Sedangkan pekerja paruh waktu laki-laki mengalami kenaikan 0,29 persen poin (dari 13,62 persen menjadi 13,91 persen). Begitu pula jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, pada Mei 2013 tingkat pekerja paruh waktu mengalami kenaikan baik di perdesaan maupun perkotaan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,05 persen poin dan 0,56 persen poin. Namun demikian, apabila dibanding kondisi November 2012, di samping penurunan tingkat pekerja paruh waktu secara nasional, penurunan juga terjadi pada kelompok jenis kelamin perempuan dan laki-laki masing-masing menurun sebesar 4,19 persen poin dan 1,26 persen poin. Untuk tingkat pekerja paruh waktu di daerah perkotaan dan perdesaan juga mengalami penurunan masing masing turun sebesar 1,41 persen poin dan 2,97 persen poin.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Mei 2013, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (40,44 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (36,76 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (32,80 persen). Sementara pada Februari 2013, Provinsi Sulawesi Barat tetap berada pada posisi tertinggi, sedangkan Provinsi Jambi

berada di urutan kedua, dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Mei 2013 diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (7,34 persen), selanjutnya posisi kedua diduduki oleh Provinsi Banten (11,00 persen), dan posisi ketiga terendah diduduki

Provinsi Kalimantan Timur (13,36 persen). Posisi tiga provinsi terendah tersebut tidak berbeda jika dibandingkan dengan kondisi Sakernas Februari 2013. Tingkat pekerja paruh waktu pada masing-masing provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 8.

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2012–2013
(persen)

Indikator	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	21,90	19,43	19,61
Laki-laki	15,17	13,62	13,91
Perempuan	32,97	28,72	28,78
Perkotaan	14,62	12,65	13,21
Perdesaan	28,66	25,64	25,69
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	56,94	56,81	56,23

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Mei 2013 mencapai 56,23 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 56 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Mei 2013 terus mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Februari 2013 dan November 2012, yaitu masing-masing menurun sebesar 0,58 persen poin dan 0,71 persen poin (Tabel 8).

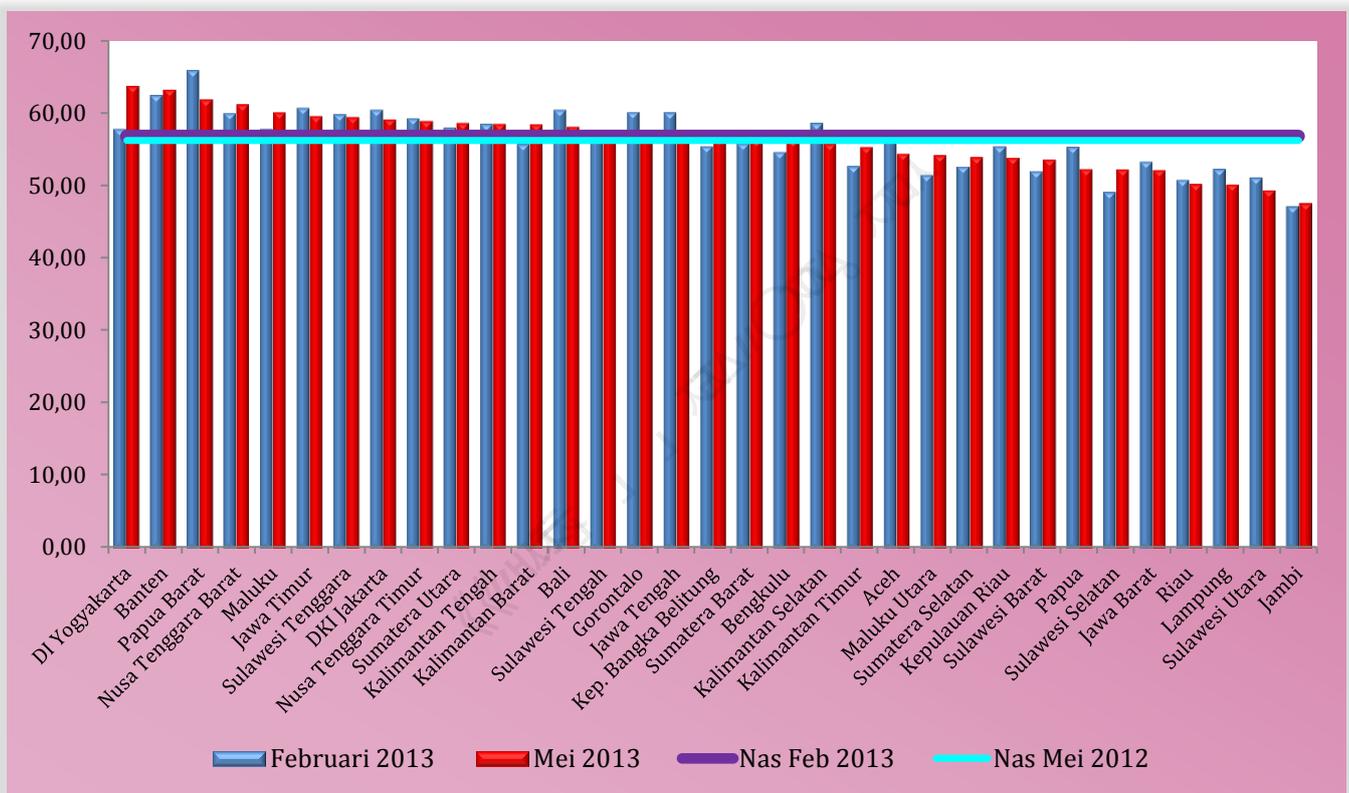
Sementara itu, Grafik 7 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu

menurut provinsi pada Februari dan Mei 2013. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi pada Mei 2013 diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta (63,71 persen), berikutnya pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Banten (63,23 persen), dan Provinsi Papua Barat berada pada urutan ketiga (61,88 persen). Sedangkan pada Februari 2013 posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua Barat (66,02 persen), Provinsi Banten (62,55 persen) dan Provinsi Jawa Timur (60,81 persen).

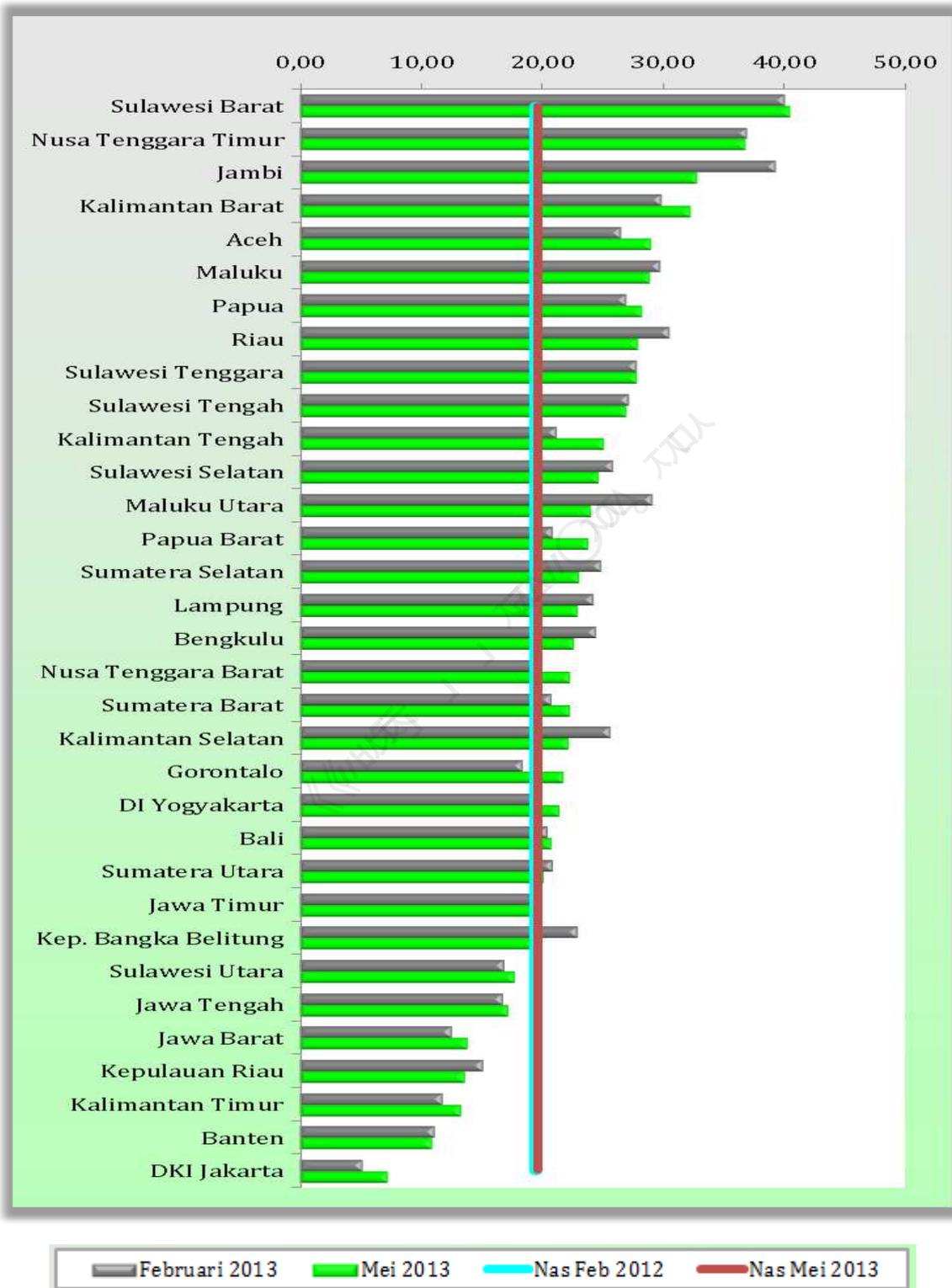
Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu terendah pada Mei 2013 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jambi (47,57 persen), Provinsi Sulawesi Utara (49,34 persen), dan Provinsi Lampung (50,17 persen). Kondisi pada Februari

2013 *share* perempuan pada pekerja paruh waktu di tiga provinsi terendah berada pada Provinsi Jambi (47,20 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (49,17 persen), dan Provinsi Riau (50,89 persen).

Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013
(persen)



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Merujuk pada hasil Sakernas baik pada November 2012, Februari dan Mei 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Mei 2013 mencapai 32,62 persen atau mengalami penurunan tipis yaitu sebesar 0,72 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2013 (33,34 persen), namun mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (33,15 persen).

Dapat diamati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode November 2012, Februari 2013 serta Mei 2013, secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Sebagai contoh pada Mei 2013, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu sebesar 43,32 persen, sementara persentase pekerja laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 25,97 persen.

Apabila kita cermati perbedaan karakteristik pekerja di perdesaan dan di perkotaan, terlihat bahwa penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada

November 2012 dan Februari maupun Mei 2013. Kondisi Mei 2013 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 43,06 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 21,64 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 30,40 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 26 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi di banding persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Mei 2013 persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 22,04 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 29,90 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013

Jumlah Jam Kerja	2012		2013	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	100,00	100,00	100,00	
0 jam*	2,22	2,02	1,60	
1–14 jam	5,83	6,18	5,72	
15–24 jam	11,43	11,42	11,58	
25–34 jam	13,67	13,72	13,72	
35–39 jam	10,32	10,17	10,09	
40–48 jam	29,38	29,84	30,40	
49–59 jam	15,39	15,25	15,38	
60 jam keatas	11,76	11,40	11,51	
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00	
0 jam*	2,33	2,08	1,65	
1–14 jam	3,71	4,09	3,53	
15–24 jam	8,44	8,41	8,73	
25–34 jam	11,97	12,09	12,06	
35–39 jam	10,08	9,68	9,66	
40–48 jam	33,35	33,87	34,47	
49–59 jam	18,10	18,13	18,24	
60 jam keatas	12,02	11,65	11,66	
Perempuan	100,00	100,00	100,00	
0 jam*	2,04	1,92	1,52	
1–14 jam	9,32	9,52	9,23	
15–24 jam	16,36	16,24	16,18	
25–34 jam	16,47	16,34	16,39	
35–39 jam	10,71	10,94	10,80	
40–48 jam	22,86	23,39	23,84	
49–59 jam	10,92	10,64	10,78	
60 jam keatas	11,32	11,01	11,26	

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013 (lanjutan)

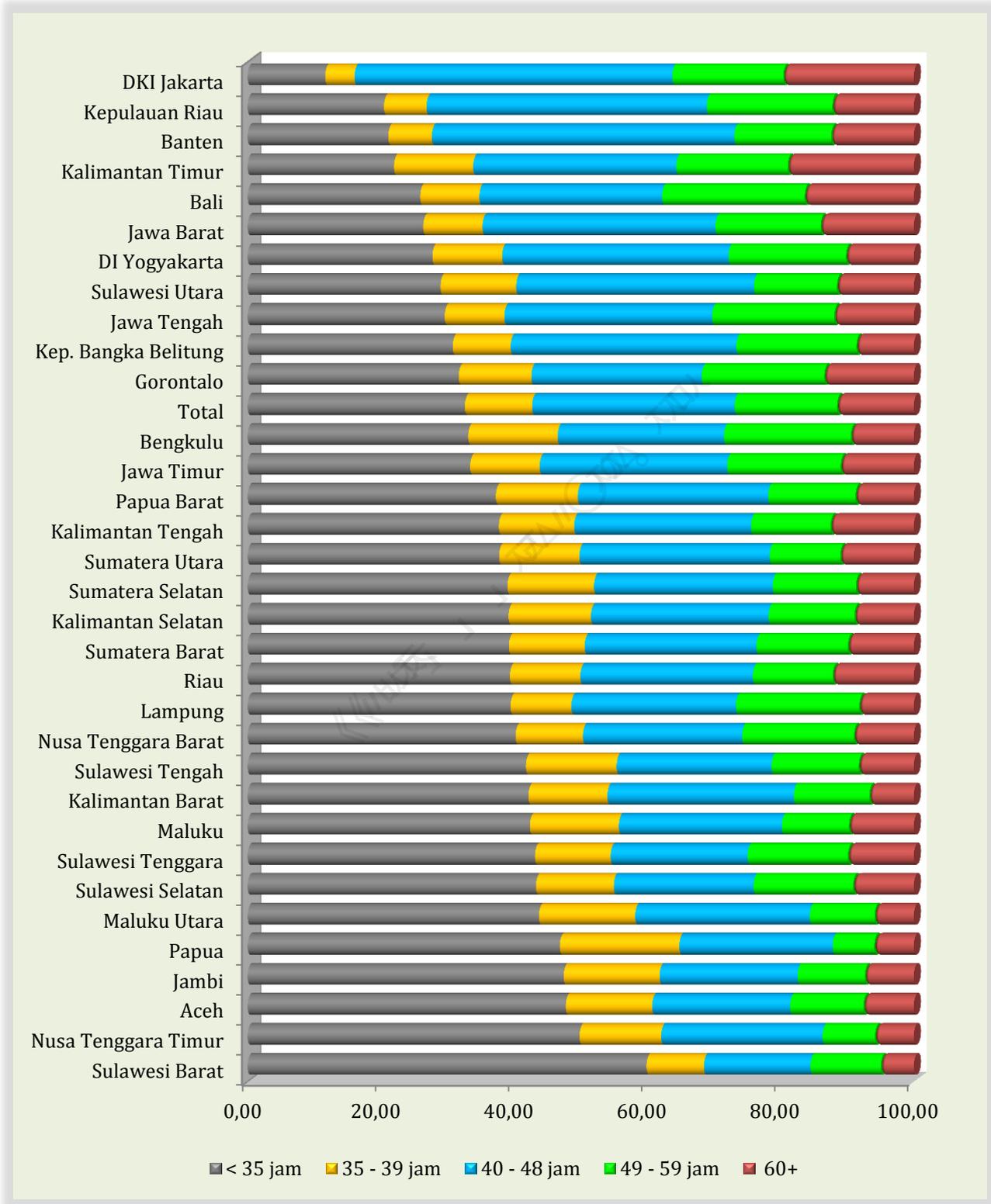
Jumlah Jam Kerja (1)	2012	2013	
	November (2)	Februari (3)	Mei (4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,86	1,78	1,36
1–14 jam	3,92	3,98	3,85
15–24 jam	7,21	7,15	7,12
25–34 jam	9,41	9,34	9,31
35–39 jam	8,72	8,62	8,47
40–48 jam	35,98	37,11	37,62
49–59 jam	16,72	16,67	16,71
60 jam keatas	16,18	15,35	15,56
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,56	2,24	1,83
1–14 jam	7,61	8,20	7,49
15–24 jam	15,35	15,33	15,83
25–34 jam	17,62	17,74	17,91
35–39 jam	11,81	11,59	11,64
40–48 jam	23,25	23,17	23,53
49–59 jam	14,15	13,94	14,12
60 jam keatas	7,65	7,79	7,65

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Sementara itu, berdasarkan Sakernas Mei 2013 (Grafik 9), tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (59,89 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (49,84 persen) dan Provinsi Aceh (47,76 persen). Sedangkan

disisi sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (11,64 persen), Provinsi Kepulauan Riau (20,47 persen), dan Provinsi Banten (21,11 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Mei 2013



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama atau sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013, dari 114,59 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,56 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,38 juta orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor yang tidak terjangkau atau terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

baru mencakup pekerja-pekerja yang berada di sektor formal.

Selama November 2012–Mei 2013 tampak sedikit fluktuasi persentase penduduk bekerja di sektor informal, sementara pemerintah tetap berusaha untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada November 2012 sebesar 53,49 persen, turun tipis menjadi 53,48 persen pada Februari 2013, dan naik menjadi 53,56 persen pada Mei 2013. Sementara persentase sektor formal pada November 2012 mencapai 46,51 persen, lalu sedikit meningkat menjadi 46,52 persen pada Februari 2013, dan turun menjadi 46,44 persen pada Mei 2013.

Menyoroti komposisi menurut jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yang pada Mei 2013 persentasenya mencapai 64,58 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Februari 2013 dan November 2012 mencapai 64,59 persen dan 64,74 persen.

Sementara itu, pada kelompok perempuan, dari total 43,89 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 25,05 juta orang (57,06 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 18,84 juta orang (42,94 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2012–2013 (dalam juta)

Kategori Sektor	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	113,40	114,02	114,59
Laki-laki	70,52	70,21	70,70
Perempuan	42,88	43,81	43,89
Perkotaan	54,60	54,56	55,89
Perdesaan	58,80	59,46	58,70
Formal	52,74	53,04	53,21
Laki-laki	34,14	34,26	34,37
Perempuan	18,60	18,78	18,84
Perkotaan	34,54	34,85	35,63
Perdesaan	18,20	18,19	17,58
Informal	60,66	60,98	61,38
Laki-laki	36,38	35,95	36,33
Perempuan	24,28	25,03	25,05
Perkotaan	20,06	19,71	20,26
Perdesaan	40,60	41,27	41,12

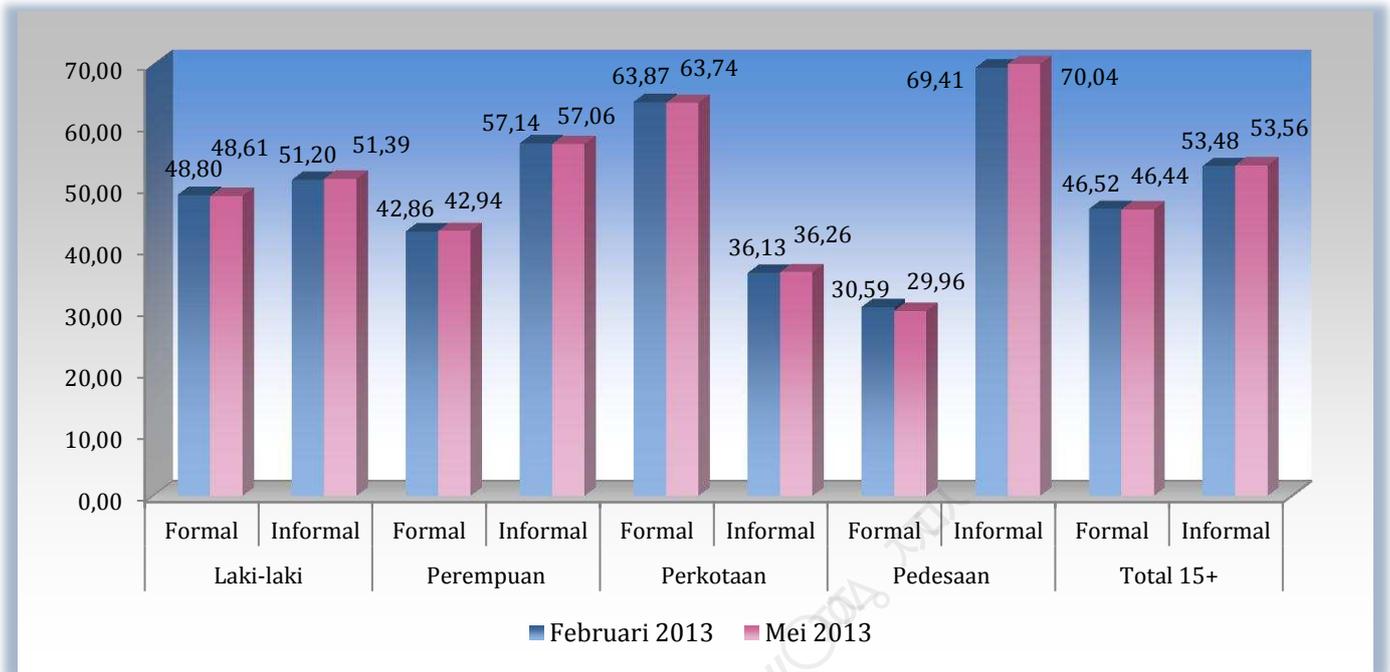
Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2012–2013

Kategori Sektor	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,51	46,52	46,44
Informal	53,49	53,48	53,56
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	64,74	64,59	64,58
Perempuan	35,26	35,41	35,42
Perkotaan	65,48	65,70	66,95
Perdesaan	34,52	34,30	33,05
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	59,97	58,95	59,20
Perempuan	40,03	41,05	40,80
Perkotaan	33,07	32,32	33,01
Perdesaan	66,93	67,68	66,99

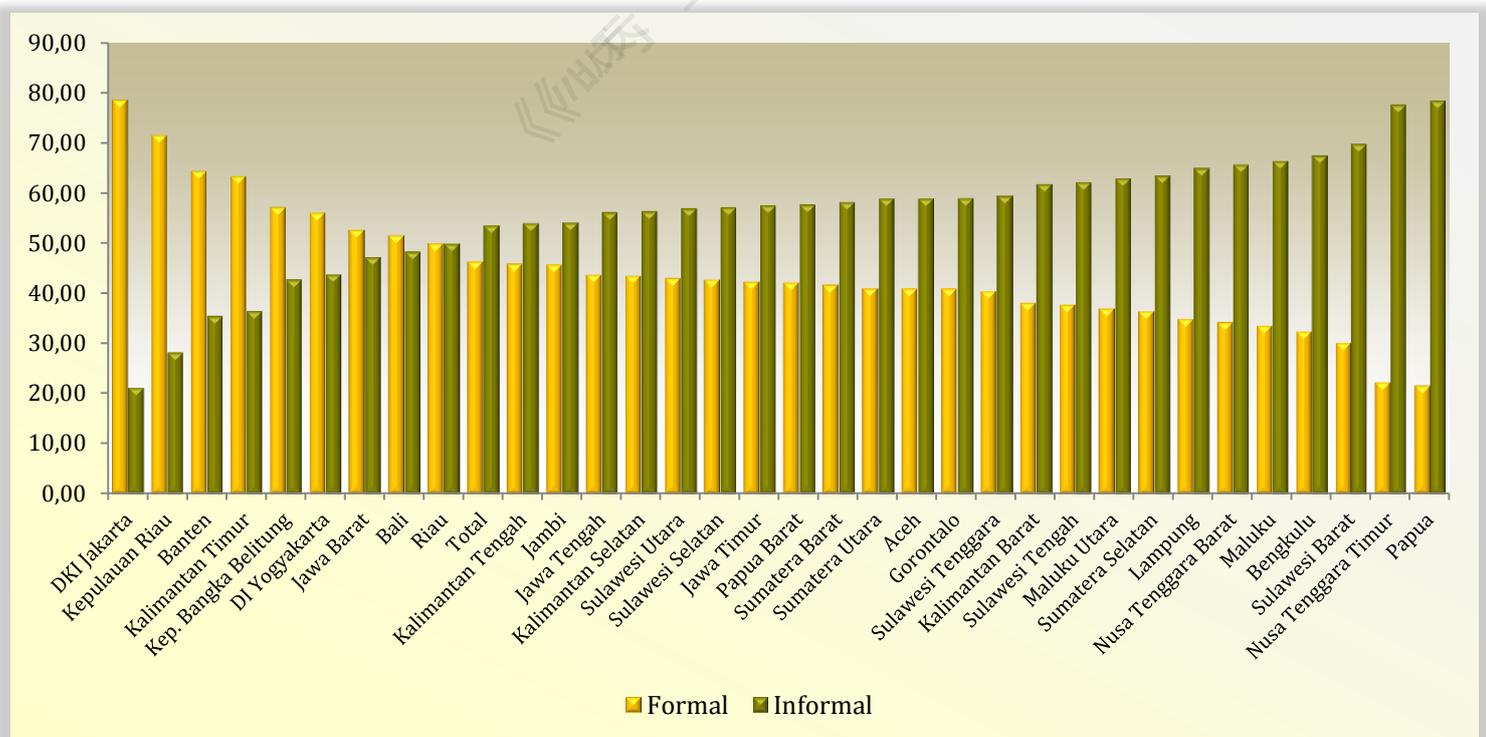
Salah satu ciri khas sektor formal, yaitu sektor yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan, hal ini terbukti dari hasil Sakernas seperti yang tampak pada Tabel 11. Hasil Sakernas Mei 2013 menunjukkan bahwa pada sektor formal sebesar 66,95 persen pekerja tinggal di perkotaan. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 yang mencapai 65,70 persen (naik 1,25 persen poin), begitu pula bila dibandingkan November 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 1,47 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih mendominasi di perdesaan, meski pada Mei 2013 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan kondisi pada Februari 2013 yaitu dari 67,68 persen pada Februari 2013 menjadi 66,99 persen pada Mei 2013.

Mengamati perbedaan wilayah ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Dari lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (78,74 persen), Kepulauan Riau (71,72 persen), Banten (64,51 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (57,27 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (63,48 persen). Di sisi lain, tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (78,34 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (77,62 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (69,77 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Februari dan Mei 2013



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Mei 2013



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Berdasarkan hasil Sakernas pada November 2012, Februari dan Mei 2013, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Indonesia menunjukkan sedikit fluktuasi. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan bahwa TPT pada Mei 2013 sebesar 5,81 persen, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin

dibandingkan Februari 2013 (5,92 persen), tetapi mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan November 2012 (5,79 persen). Dalam hal ini, TPT sebesar 5,81 persen dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur.

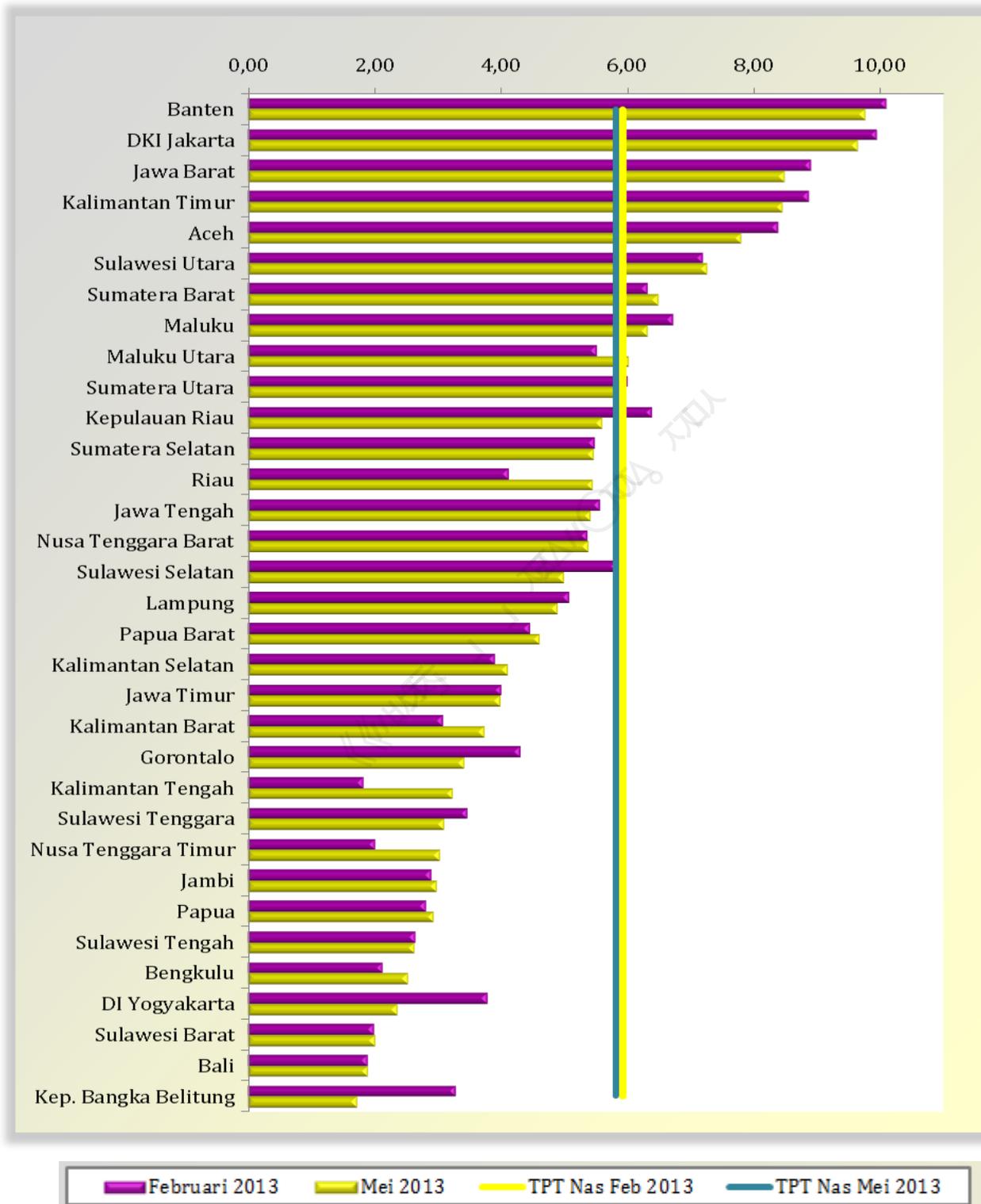
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2012–2013
(persen)

TPT	2012		2013	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	5,79	5,92	5,81	
Laki-laki	5,12	5,64	5,49	
Perempuan	6,86	6,36	6,32	
Perkotaan	7,14	7,30	7,15	
Perdesaan	4,49	4,61	4,50	

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada Mei 2013 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2013, akan tetapi mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012. Sementara TPT perempuan mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 maupun November 2012 dengan penurunan masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,54 persen poin.

Bila dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, TPT pada periode Februari–Mei 2013, mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan di wilayah perkotaan sebesar 0,15 persen poin, dan di perdesaan turun sebesar 0,11 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2012 terjadi kenaikan TPT baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,01 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2013 (persen)



TPT tertinggi menurut provinsi berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dengan TPT masing-masing sebesar 9,76 persen, 9,65 persen, dan 8,49 persen. Urutan ketiga provinsi ini tidak berubah pada Sakernas Februari 2013. Sementara itu, provinsi dengan TPT terendah pada Mei 2013 diduduki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar

1,72 persen, Provinsi Bali sebesar 1,90 persen, dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,02 persen. Sedangkan berdasarkan Sakernas Februari 2013 urutan ini diduduki oleh Provinsi Kalimantan Tengah (1,82 persen), Provinsi Bali (1,89 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (2,00 persen). (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12).

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

TPT penduduk pada kelompok umur muda berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 adalah sebesar 18,02 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 0,49 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2013 (17,53 persen), dan naik sebesar 0,43 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (17,59 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, baik pada Mei maupun Februari 2013 menunjukkan bahwa

TPT penduduk umur muda pada laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPT pada perempuan, akan tetapi keadaan pada November 2012 berbeda, yang menunjukkan bahwa TPT umur muda perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Menyoroti lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda kelompok laki-laki pada Mei 2013 senantiasa mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Februari 2013 maupun November 2012. Sementara TPT umur muda perempuan mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan Februari 2013 maupun November 2012. Sebagai gambaran, TPT umur muda laki-laki naik sebesar 0,86 persen poin selama periode Februari–Mei 2013, sementara pada kelompok perempuan turun sebesar 0,11 persen poin selama periode yang sama.

Dilihat berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Mei 2013, TPT daerah perkotaan mencapai 19,45 persen sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 16,54 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 19 orang yang

mengganggu, sementara untuk daerah perdesaan hanya sekitar 16 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Mei 2013 sebesar 5,52 yang berarti TPT umur muda lima kali lipat lebih tinggi dibanding TPT dewasa. Sejalan dengan kenaikan TPT umur muda pada Mei 2013, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin bila dibanding Februari 2013 atau naik

sebesar 0,12 poin dibanding November 2012. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan baik pada November 2012 maupun pada Februari dan Mei 2013. Apabila dilihat menurut kategori kota- desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibanding di daerah perkotaan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2012–2013

Indikator	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	17,59	17,53	18,02
Laki-laki	17,13	17,80	18,66
Perempuan	18,30	17,11	17,00
Perkotaan	19,23	20,10	19,45
Perdesaan	16,04	15,10	16,54
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,40	5,07	5,52
Laki-laki	6,61	5,80	6,77
Perempuan	4,22	4,19	4,18
Perkotaan	4,21	4,38	4,32
Perdesaan	8,02	6,30	8,01
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	53,67	51,74	53,55
Laki-laki	58,15	54,99	58,42
Perempuan	48,27	47,16	46,81
Perkotaan	47,28	48,17	48,23
Perdesaan	63,37	57,08	61,84
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	8,86	8,77	8,92
Laki-laki	10,44	10,83	11,23
Perempuan	7,27	6,68	6,57
Perkotaan	9,42	9,79	9,38
Perdesaan	8,31	7,75	8,41

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Mei 2013 cukup tinggi yaitu 53,55 persen. Angka ini mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,81 persen poin bila dibanding Februari 2013, namun turun tipis sebesar 0,12 persen poin bila dibanding keadaan pada November 2012.

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur yang mencapai 53,55 persen pada Mei 2013 dapat diartikan bahwa pada Mei 2013, dari 100 orang penganggur terdapat

sejumlah 54 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun.

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Mei 2013 sebesar 8,92 persen atau naik dari angka Februari 2013 yang mencapai 8,77 persen maupun November 2012 yang mencapai 8,86 persen. *Share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda yang mencapai 8,92 persen dapat diartikan bahwa pada Mei 2013 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 9 orang diantaranya menganggur.

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Sakernas Mei 2013 menunjukkan bahwa secara umum TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,33 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok “tidak pernah sekolah” atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,34 persen.

Seiring dengan penurunan TPT nasional periode Februari 2013–Mei 2013, penurunan TPT menurut tingkat pendidikan hanya terdapat pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan tinggi dengan penurunan masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,23 persen poin. Begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan November 2012, meski terjadi kenaikan TPT nasional, penurunan TPT hanya terdapat pada sekolah menengah sebesar 0,44 persen poin, dan pada tingkat pendidikan sekolah tinggi yang turun sebesar 0,56 persen poin.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi periode Februari 2013–Mei 2013 hanya diikuti dengan penurunan TPT pada penduduk perempuan sebesar 0,98 persen poin, sedangkan pada kelompok laki-laki TPT ini mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen poin. Begitu pula pada klasifikasi daerah kota-desa pada tingkat pendidikan yang sama, pada periode yang sama, penurunan hanya terjadi di daerah perdesaan yaitu sebesar 1,29 persen poin, sementara di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen poin.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)

Tingkat Pendidikan	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,79	5,92	5,81
Tidak Pernah Sekolah	1,98	2,01	2,34
Laki-laki	1,69	2,62	3,10
Perempuan	2,20	1,56	1,77
Perkotaan	4,47	5,31	5,13
Perdesaan	1,25	1,08	1,57
Sekolah Dasar	4,87	5,13	5,13
Laki-laki	4,12	4,96	4,91
Perempuan	6,10	5,40	5,49
Perkotaan	6,48	6,75	6,82
Perdesaan	3,85	4,11	4,03
Sekolah Menengah	8,77	8,78	8,33
Laki-laki	7,84	7,78	7,12
Perempuan	10,69	10,76	10,83
Perkotaan	8,91	9,12	8,55
Perdesaan	8,46	8,06	7,86
Sekolah Tinggi	5,55	5,22	4,99
Laki-laki	4,77	4,71	5,14
Perempuan	6,46	5,80	4,82
Perkotaan	5,52	5,08	5,20
Perdesaan	5,66	5,62	4,33

Secara keseluruhan pada periode Februari 2013–Mei 2013, kenaikan TPT terbesar terdapat pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah untuk wilayah perdesaan dengan kenaikan sebesar 0,49 persen poin. Pada Februari 2013 TPT pada kelompok ini adalah 1,08 persen, sedangkan pada Mei 2013 meningkat menjadi 1,57 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan

seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada November 2012, maupun Februari dan Mei 2013 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Seperti pada Mei 2013, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 53,24 persen, meningkat sebesar 0,84 persen poin jika dibandingkan Februari 2013 dan meningkat sebesar 1,81 persen poin dibandingkan November 2012 (51,43 persen).

Sementara itu, pada periode Februari 2013–Mei 2013, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,98 persen poin dan 0,08 persen poin. Sementara pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen poin dan 0,84 persen poin.

Melihat lebih lanjut pada Tabel 15, baik pada keadaan November 2012 serta Februari dan Mei 2013, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Sebagai gambaran, pada Mei 2013, diantara seluruh penganggur perempuan yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 9,22 persen, sementara diantara seluruh penganggur

laki-laki yang berpendidikan sekolah tinggi hanya sebesar 7,96 persen.

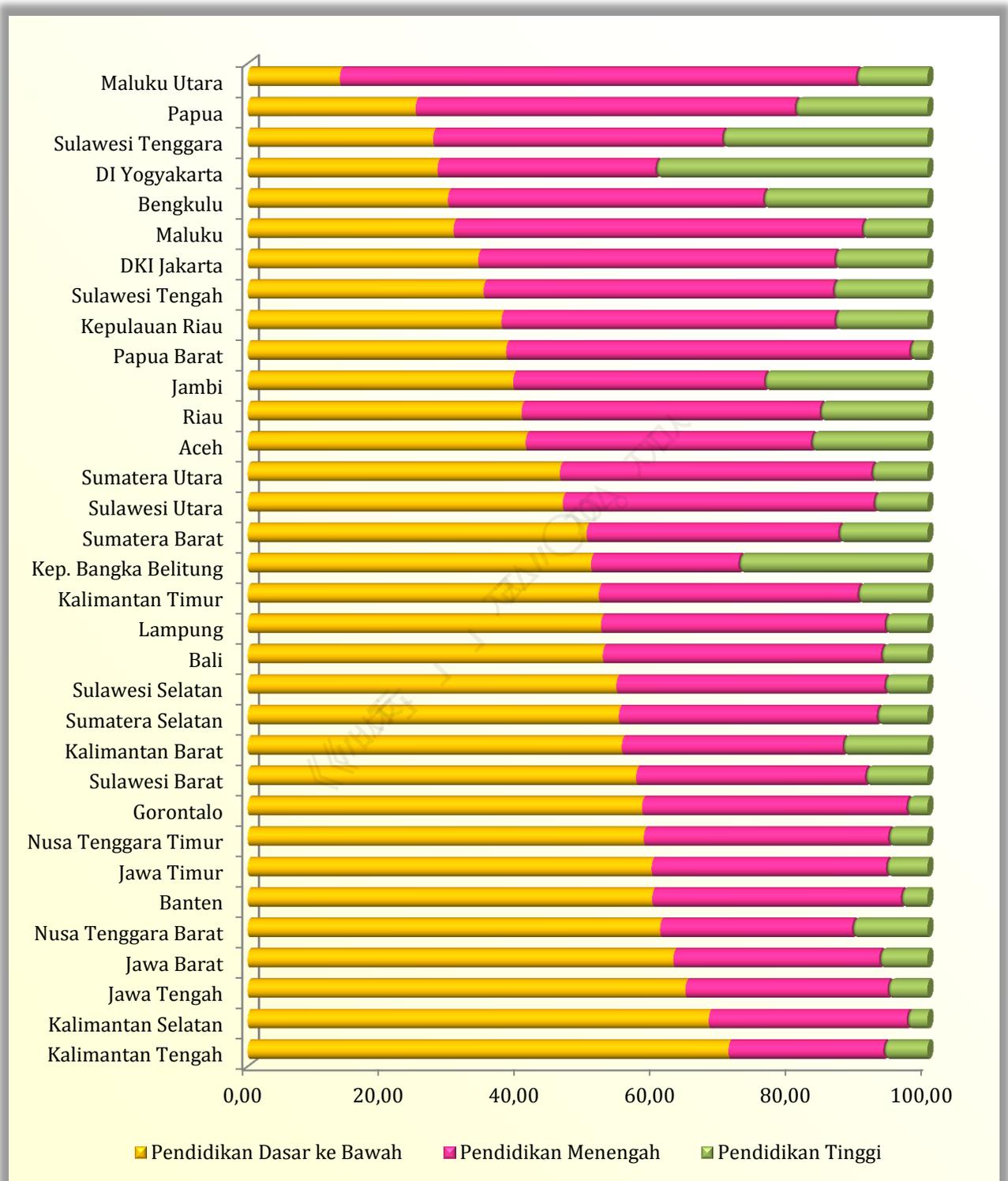
Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Mei 2013, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Sebagai gambaran pada Mei 2013, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 2,35 persen dan 64,81 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 1,36 persen dan 45,81 persen.

Tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi pada Mei 2013 yaitu: Provinsi DI Yogyakarta (39,99 persen), Provinsi Sulawesi Tenggara (30,19 persen), dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (27,77 persen). Sementara tiga provinsi yang penganggurannya masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan dasar ke bawah secara berturut-turut yaitu provinsi: Kalimantan Tengah (70,77 persen); Kalimantan Selatan (67,86 persen); dan Jawa Tengah (64,42 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,51	1,53	1,75
Laki-laki	1,00	1,45	1,71
Perempuan	2,11	1,65	1,79
Perkotaan	1,28	1,49	1,36
Perdesaan	1,84	1,60	2,35
Sekolah Dasar	51,43	52,40	53,24
Laki-laki	49,31	53,65	54,15
Perempuan	53,99	50,64	51,98
Perkotaan	44,23	44,35	45,81
Perdesaan	62,37	64,45	64,81
Sekolah Menengah	37,90	37,50	36,52
Laki-laki	41,94	37,81	36,18
Perempuan	33,04	37,05	37,01
Perkotaan	43,30	43,80	41,81
Perdesaan	29,72	28,07	28,30
Sekolah Tinggi	9,16	8,57	8,49
Laki-laki	7,75	7,09	7,96
Perempuan	10,86	10,66	9,22
Perkotaan	11,19	10,36	11,02
Perdesaan	6,07	5,88	4,54

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Mei 2013



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2013 mencapai 13,07 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari sejumlah 7,36 juta orang berjenis kelamin laki-

laki dan sisanya sebanyak 5,71 juta orang adalah perempuan. Sedangkan berdasarkan perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Mei 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 9,12 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,95 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2012–2013 (dalam juta)

Setengah Penganggur	2012		2013	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	10,25	13,56	13,07	
Laki-laki	6,32	7,70	7,36	
Perempuan	3,93	5,86	5,71	
Perkotaan	3,23	4,27	3,95	
Perdesaan	7,02	9,29	9,12	

Pada periode Februari 2013–Mei 2013 memperlihatkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 490 ribu orang. Penurunan angka secara nasional ini diikuti dengan penurunan jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dengan penurunan masing-masing sebanyak 340 ribu orang dan 150 ribu orang. Penurunan juga terjadi baik di

wilayah perkotaan maupun perdesaan, yaitu masing-masing sebanyak 320 ribu orang dan 170 ribu orang.

Tabel 17 berikut ini menunjukkan bahwa persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Mei 2013 turun sebesar 0,45 persen poin dibandingkan dengan kondisi Februari 2013, akan tetapi naik sebesar 2,23 persen poin jika dibandingkan November 2012.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada November 2012 sebesar 8,51 persen, sedangkan pada Februari dan Mei 2013 masing-masing sebesar 11,19 persen dan 10,74 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada November 2012, dari 100 orang

penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sebanyak 9 orang setengah penganggur, sedangkan pada Februari maupun Mei 2013 naik menjadi sekitar 11 orang setengah penganggur.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2012–2013

Indikator	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	8,51	11,19	10,74
Laki-laki	8,50	10,35	9,84
Perempuan	8,54	12,53	12,20
Perkotaan	5,49	7,25	6,56
Perdesaan	11,40	14,91	14,85
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	9,04	11,89	11,41
Laki-laki	8,96	10,96	10,41
Perempuan	9,16	13,38	13,02
Perkotaan	5,92	7,82	7,06
Perdesaan	11,93	15,63	15,55

Sementara itu, pada periode Februari–Mei 2013 terjadi sedikit penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja. Pada Februari 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja sebanyak 12 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2013 sedikit turun hingga mencapai 11 orang setengah penganggur per 100 orang penduduk bekerja.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin selama periode Februari–Mei 2013, penurunan

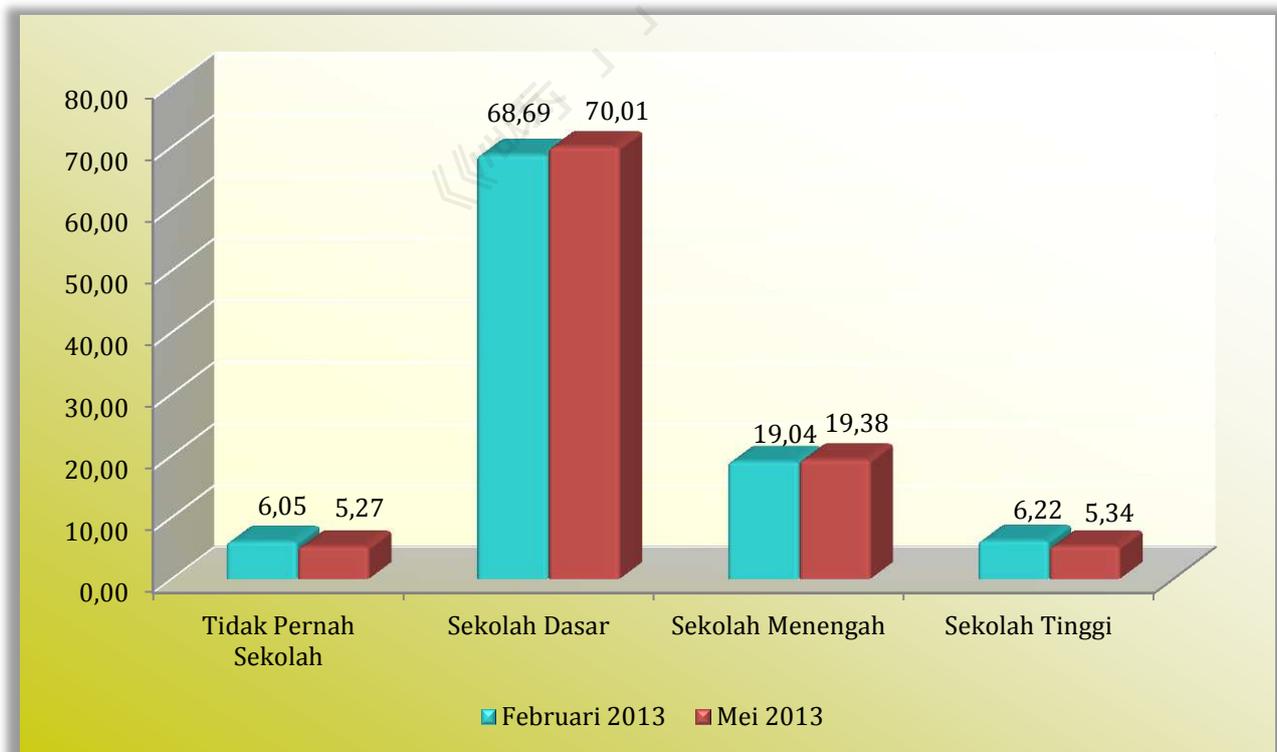
persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja tampak pada kelompok laki-laki. Pada Februari 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja, 11 orang laki-laki diantaranya adalah setengah penganggur. Sedangkan pada Mei 2013, laki-laki yang termasuk setengah penganggur turun menjadi sebanyak 10 orang.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Februari–Mei 2013 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Pada Mei 2013 dibandingkan Februari 2013, terjadi penurunan sebesar 0,76 persen poin di daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan penurunan hanya mencapai 0,08 persen poin.

Menilik komposisi setengah penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tampak pada Grafik 14, penurunan persentase setengah penganggur menurut tingkat pendidikan terjadi pada kelompok penduduk

yang “tidak pernah sekolah” yaitu sebesar 0,78 persen poin, dan pada tingkat pendidikan sekolah tinggi yang turun sebesar 0,88 persen poin (Februari–Mei 2013). Kemudian bila dirinci lagi berdasarkan jenis kelamin, penurunan pada kelompok perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki seperti yang terlihat baik pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah maupun pada sekolah tinggi. Sementara itu pada periode yang sama, kenaikan persentase setengah penganggur terbesar menurut tingkat pendidikan terdapat pada tingkat sekolah dasar yaitu 1,32 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2013



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,42	6,05	5,27
Laki-laki	3,53	4,32	3,71
Perempuan	5,86	8,32	7,27
Perkotaan	2,70	3,40	3,30
Perdesaan	5,22	7,26	6,11
Sekolah Dasar	69,09	68,69	70,01
Laki-laki	70,76	71,04	70,47
Perempuan	66,42	65,60	69,42
Perkotaan	60,04	59,95	59,01
Perdesaan	73,26	72,70	74,77
Sekolah Menengah	20,12	19,04	19,38
Laki-laki	21,22	20,29	21,67
Perempuan	18,34	17,40	16,44
Perkotaan	26,75	26,09	28,21
Perdesaan	17,06	15,80	15,57
Sekolah Tinggi	6,37	6,22	5,34
Laki-laki	4,49	4,35	4,15
Perempuan	9,38	8,68	6,87
Perkotaan	10,51	10,56	9,48
Perdesaan	4,46	4,24	3,55

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2013 adalah 30,74 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,74 persen.

Jika dibandingkan dengan Februari 2013, tingkat ketidakaktifan pada Mei 2013 hanya mengalami penurunan sangat tipis, yaitu sebesar 0,05 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 menurun sebesar 0,30 persen poin. Terjadinya fenomena penurunan tingkat ketidakaktifan ini sebenarnya menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari kelompok bukan angkatan kerja ke angkatan kerja. Namun demikian, secara absolut penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja mengalami

sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 90 ribu orang dari 53,91 juta orang pada Februari 2013 menjadi 54,00 juta orang pada Mei 2013.

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ternyata terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan angka Mei 2013 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 47 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan pada laki-laki yaitu 0,19 persen poin, namun sebaliknya pada perempuan tingkat ketidakaktifan justru meningkat sebesar 0,10 persen poin.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2012–2013
(persen)

Tingkat ketidakaktifan	2012		2013	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	31,04	30,79	30,74	
Laki-laki	14,68	14,88	14,69	
Perempuan	47,33	46,64	46,74	
Perkotaan	32,88	33,04	32,62	
Perdesaan	29,18	28,52	28,79	

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Mei 2013 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 32,62 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 28,79 persen. Peningkatan tingkat ketidakaktifan terjadi di daerah perdesaan pada Mei 2013 bila dibanding Februari 2013 yaitu sebesar 0,27 persen sementara untuk daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin, yaitu dari 33,04 persen pada Februari 2013 menjadi 32,62 persen pada Mei 2013.

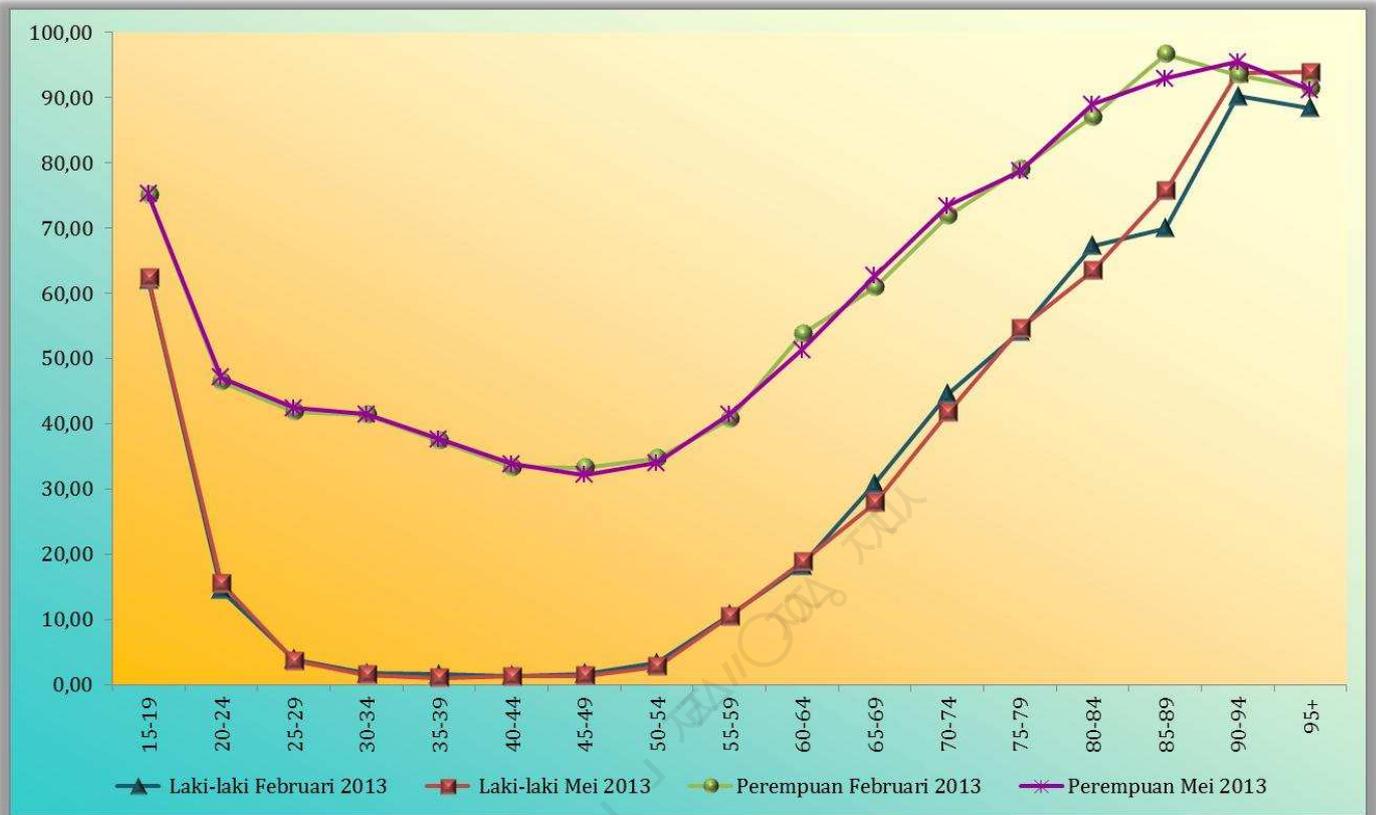
Pada Grafik 15, tampak pola tingkat ketidakaktifan yang membentuk huruf “J” yang mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua.

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Mei 2013, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 62,37 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,07 persen pada kelompok umur (35–39) tahun. Tingkat ketidakaktifan laki-laki kembali meningkat dimulai pada kelompok umur (40–44) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 75,25 persen. Kemudian pada kelompok umur (20–24) tahun, tingkat ketidakaktifan perempuan mulai terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sebesar 32,21 persen. Tingkat ketidakaktifan perempuan kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2013 (persen)



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Secara nasional hasil Sakernas Mei 2013 tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan Sakernas pada Februari 2013. Angkatan kerja pada Mei 2013 ini masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,31 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah

menengah sebesar 25,47 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,89 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,33 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Mei 2013, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 12,10 persen dibandingkan 8,49 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada Februari maupun Mei 2013, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai lebih dari 55 persen), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah (sekitar 37 persen).

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda yaitu angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku

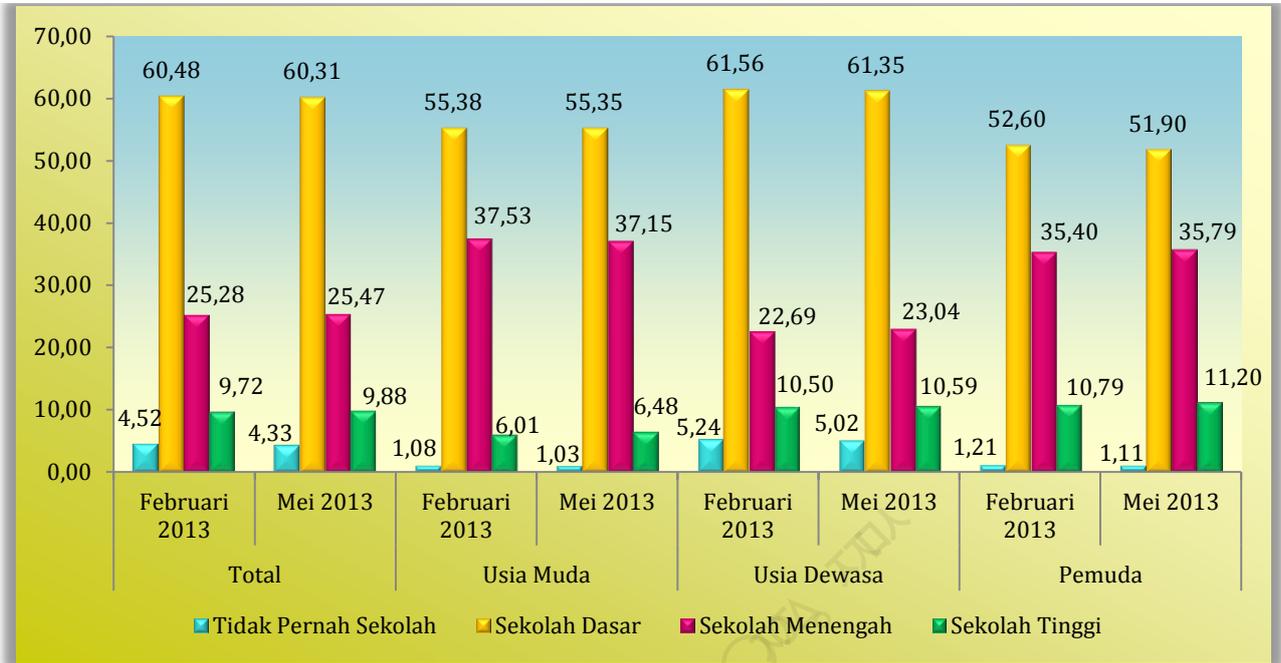
sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Merujuk pada Grafik 17, pada Mei 2013, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar ke bawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

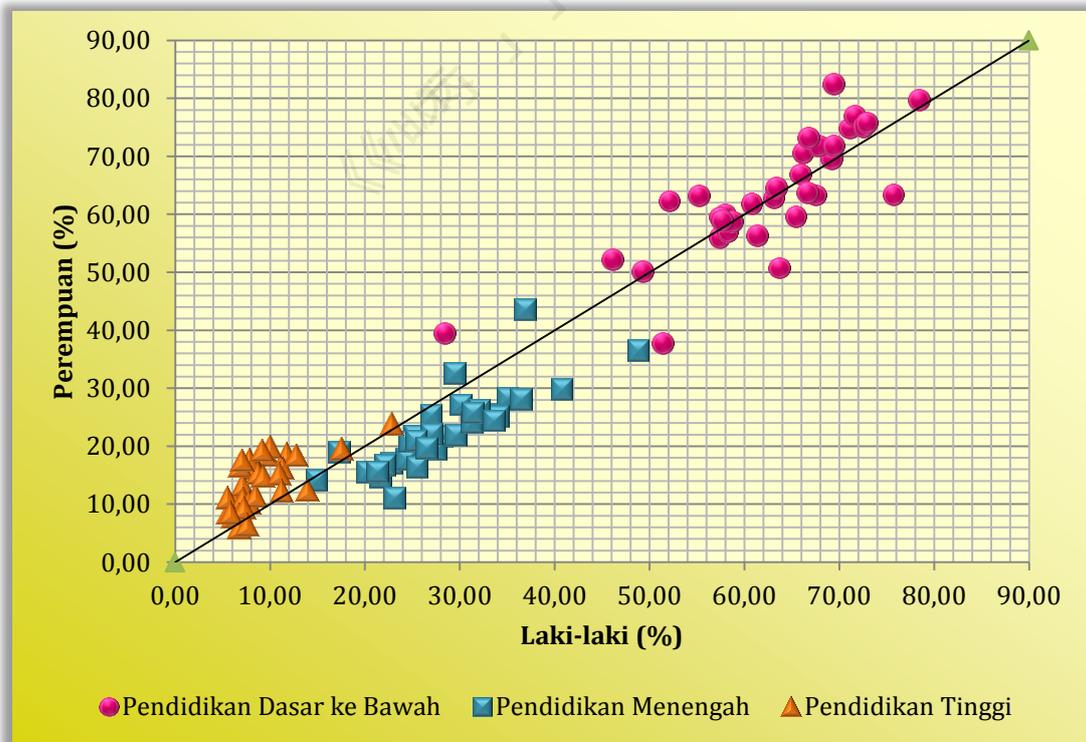
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,39	4,52	4,33
Laki-laki	3,03	3,11	3,04
Perempuan	6,57	6,75	6,39
Perkotaan	2,05	2,04	1,89
Perdesaan	6,62	6,85	6,72
Sekolah Dasar	61,05	60,48	60,31
Laki-laki	61,28	61,01	60,57
Perempuan	60,69	59,65	59,90
Perkotaan	48,77	48,00	48,00
Perdesaan	72,78	72,27	72,37
Sekolah Menengah	25,02	25,28	25,47
Laki-laki	27,38	27,40	27,90
Perempuan	21,21	21,91	21,61
Perkotaan	34,70	35,06	34,95
Perdesaan	15,78	16,05	16,19
Sekolah Tinggi	9,54	9,72	9,89
Laki-laki	8,31	8,48	8,49
Perempuan	11,53	11,69	12,10
Perkotaan	14,48	14,90	15,16
Perdesaan	4,82	4,83	4,72

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2013



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Mei 2013



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 591	1 629	3 220	1 599	1 637	3 236	1 608	1 646	3 253
Sumatera Utara	4 356	4 498	8 854	4 365	4 507	8 872	4 374	4 515	8 889
Sumatera Barat	1 651	1 739	3 390	1 656	1 744	3 399	1 660	1 749	3 408
Riau	2 071	1 947	4 018	2 088	1 963	4 051	2 105	1 979	4 084
Jambi	1 160	1 113	2 274	1 167	1 119	2 286	1 173	1 126	2 299
Sumatera Selatan	2 740	2 666	5 406	2 751	2 677	5 428	2 762	2 687	5 449
Bengkulu	629	605	1 234	631	607	1 238	633	609	1 242
Lampung	2 833	2 670	5 503	2 840	2 677	5 516	2 847	2 683	5 530
Kep. Bangka Belitung	483	443	926	487	446	933	490	449	940
Kepulauan Riau	682	649	1 330	690	656	1 346	698	664	1 361
DKI Jakarta	3 799	3 725	7 524	3 810	3 735	7 545	3 821	3 746	7 567
Jawa Barat	16 078	15 646	31 724	16 142	15 709	31 852	16 207	15 772	31 979
Jawa Tengah	11 750	12 190	23 940	11 754	12 193	23 947	11 756	12 195	23 952
DI Yogyakarta	1 344	1 407	2 751	1 346	1 410	2 756	1 349	1 412	2 761
Jawa Timur	13 953	14 669	28 622	13 970	14 688	28 658	13 987	14 705	28 692
Banten	4 043	3 887	7 931	4 068	3 911	7 980	4 093	3 936	8 029
Bali	1 510	1 513	3 023	1 517	1 520	3 037	1 524	1 527	3 051
Nusa Tenggara Barat	1 499	1 672	3 171	1 502	1 676	3 178	1 505	1 680	3 185
Nusa Tenggara Timur	1 493	1 577	3 071	1 500	1 585	3 085	1 507	1 592	3 099
Kalimantan Barat	1 554	1 491	3 046	1 557	1 494	3 051	1 559	1 496	3 055
Kalimantan Tengah	833	754	1 587	836	757	1 593	839	760	1 599
Kalimantan Selatan	1 349	1 335	2 684	1 354	1 341	2 695	1 360	1 347	2 707
Kalimantan Timur	1 430	1 261	2 691	1 442	1 272	2 715	1 455	1 283	2 738
Sulawesi Utara	854	826	1 681	857	829	1 685	859	831	1 689
Sulawesi Tengah	939	896	1 835	943	900	1 843	947	904	1 851
Sulawesi Selatan	2 709	2 972	5 681	2 715	2 979	5 694	2 721	2 985	5 706
Sulawesi Tenggara	752	765	1 517	755	769	1 524	759	772	1 531
Gorontalo	369	374	743	371	376	747	373	377	750
Sulawesi Barat	389	398	787	392	400	791	394	402	796
Maluku	521	522	1 042	524	525	1 049	527	528	1 056
Maluku Utara	360	346	706	362	348	710	364	350	714
Papua Barat	292	254	545	294	256	550	297	258	555
Papua	1 103	982	2 084	1 117	994	2 110	1 130	1 007	2 137
Indonesia	87 118	87 421	174 539	87 401	87 698	175 099	87 682	87 972	175 654

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur (1)	2012	2013	
	November (2)	Februari (3)	Mei (4)
15 Tahun keatas	174,54	175,10	175,66
Laki-laki	87,12	87,40	87,68
Perempuan	87,42	87,70	87,97
Perkotaan	87,61	87,89	89,33
Perdesaan	86,93	87,21	86,32
(15–24)	42,17	42,31	42,45
Laki-laki	21,21	21,28	21,35
Perempuan	20,96	21,03	21,10
Perkotaan	21,08	21,15	22,12
Perdesaan	21,09	21,16	20,33
(15–64)	162,59	163,18	163,92
Laki-laki	81,83	82,12	82,52
Perempuan	80,76	81,06	81,40
Perkotaan	81,82	82,14	84,05
Perdesaan	80,77	81,04	79,86
(25–54)	105,14	105,48	105,82
Laki-laki	52,86	53,03	53,20
Perempuan	52,28	52,45	52,62
Perkotaan	53,04	53,21	54,37
Perdesaan	52,10	52,27	51,46
(25–34)	42,57	42,71	42,86
Laki-laki	21,30	21,37	21,45
Perempuan	21,27	21,34	21,41
Perkotaan	21,60	21,67	22,55
Perdesaan	20,97	21,04	20,31
(35–54)	62,57	62,77	62,96
Laki-laki	31,56	31,66	31,76
Perempuan	31,02	31,11	31,21
Perkotaan	31,44	31,54	31,82
Perdesaan	31,13	31,23	31,14
(55–64)	15,28	15,39	15,64
Laki-laki	7,77	7,81	7,96
Perempuan	7,51	7,58	7,68
Perkotaan	7,71	7,78	7,56
Perdesaan	7,58	7,61	8,08
65 Tahun keatas	11,95	11,92	11,74
Laki-laki	5,29	5,28	5,17
Perempuan	6,66	6,64	6,57
Perkotaan	5,79	5,75	5,28
Perdesaan	6,16	6,17	6,46

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 342	767	2 109	1 320	802	2 122	1 313	797	2 110
Sumatera Utara	3 768	2 718	6 487	3 737	2 715	6 452	3 743	2 711	6 454
Sumatera Barat	1 400	979	2 379	1 400	990	2 391	1 406	982	2 387
Riau	1 804	890	2 695	1 819	997	2 816	1 823	940	2 763
Jambi	992	551	1 543	996	586	1 582	1 011	553	1 564
Sumatera Selatan	2 340	1 429	3 769	2 350	1 555	3 905	2 340	1 579	3 919
Bengkulu	544	351	895	551	369	920	548	357	905
Lampung	2 455	1 380	3 835	2 467	1 419	3 886	2 479	1 463	3 942
Kep. Bangka Belitung	429	226	654	429	234	663	429	221	651
Kepulauan Riau	600	343	943	606	343	949	607	347	954
DKI Jakarta	3 204	2 017	5 222	3 167	1 997	5 164	3 230	2 028	5 258
Jawa Barat	13 715	6 517	20 232	13 795	6 593	20 389	13 929	6 945	20 874
Jawa Tengah	9 972	7 110	17 083	9 897	7 012	16 910	10 021	6 951	16 972
DI Yogyakarta	1 061	803	1 864	1 067	842	1 909	1 068	866	1 933
Jawa Timur	11 925	8 080	20 005	11 902	8 194	20 096	11 819	8 118	19 938
Banten	3 433	2 017	5 450	3 525	1 951	5 476	3 561	1 914	5 475
Bali	1 277	1 050	2 327	1 296	1 100	2 396	1 295	1 086	2 381
Nusa Tenggara Barat	1 255	899	2 155	1 263	973	2 235	1 275	938	2 213
Nusa Tenggara Timur	1 233	976	2 209	1 261	1 051	2 312	1 269	973	2 242
Kalimantan Barat	1 349	901	2 250	1 333	892	2 224	1 351	875	2 225
Kalimantan Tengah	743	443	1 186	731	426	1 157	724	412	1 135
Kalimantan Selatan	1 161	733	1 894	1 165	772	1 937	1 181	739	1 920
Kalimantan Timur	1 283	551	1 834	1 281	609	1 889	1 319	612	1 931
Sulawesi Utara	727	381	1 108	726	364	1 089	726	376	1 102
Sulawesi Tengah	820	494	1 314	825	497	1 323	829	477	1 306
Sulawesi Selatan	2 258	1 331	3 590	2 247	1 373	3 620	2 254	1 416	3 670
Sulawesi Tenggara	639	417	1 056	636	424	1 060	642	429	1 070
Gorontalo	314	165	479	311	170	480	319	190	509
Sulawesi Barat	337	247	585	333	240	573	339	249	588
Maluku	421	279	700	429	285	714	424	285	709
Maluku Utara	301	176	477	306	176	482	304	174	478
Papua Barat	236	144	381	237	138	375	240	138	378
Papua	983	674	1 657	989	705	1 694	987	711	1 698
Indonesia	74 326	46 042	120 367	74 399	46 793	121 192	74 803	46 852	121 655

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	2012		2013	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15 Tahun keatas	120,37	121,19	121,66	
Laki-laki	74,33	74,40	74,80	
Perempuan	46,04	46,79	46,85	
Perkotaan	58,80	58,85	60,19	
Perdesaan	61,57	62,34	61,47	
(15–24)	21,25	21,16	21,01	
Laki-laki	12,92	12,95	12,86	
Perempuan	8,33	8,21	8,15	
Perkotaan	10,32	10,30	10,67	
Perdesaan	10,92	10,86	10,34	
(15–64)	115,69	116,48	116,97	
Laki-laki	71,38	71,50	71,86	
Perempuan	44,31	44,98	45,12	
Perkotaan	56,94	57,01	58,51	
Perdesaan	58,75	59,47	58,46	
(25–54)	83,63	84,54	84,97	
Laki-laki	51,72	51,83	52,16	
Perempuan	31,91	32,72	32,81	
Perkotaan	41,67	41,84	43,08	
Perdesaan	41,95	42,70	41,89	
(25–34)	32,78	33,22	33,31	
Laki-laki	20,74	20,77	20,89	
Perempuan	12,04	12,45	12,42	
Perkotaan	16,69	16,82	17,61	
Perdesaan	16,09	16,40	15,70	
(35–54)	50,85	51,33	51,66	
Laki-laki	30,97	31,06	31,28	
Perempuan	19,87	20,27	20,39	
Perkotaan	24,98	25,02	25,47	
Perdesaan	25,86	26,31	26,19	
(55–64)	10,81	10,78	10,99	
Laki-laki	6,74	6,73	6,84	
Perempuan	4,07	4,05	4,15	
Perkotaan	4,94	4,86	4,76	
Perdesaan	5,87	5,91	6,23	
65 Tahun keatas	4,68	4,71	4,68	
Laki-laki	2,95	2,90	2,95	
Perempuan	1,73	1,82	1,74	
Perkotaan	1,86	1,85	1,68	
Perdesaan	2,82	2,87	3,00	

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(persen)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	84,35	47,12	65,52	82,53	48,98	65,56	81,64	48,43	64,84
Sumatera Utara	86,51	60,44	73,26	85,62	60,24	72,72	85,57	60,05	72,60
Sumatera Barat	84,78	56,30	70,17	84,58	56,79	70,32	84,68	56,14	70,04
Riau	87,13	45,73	67,07	87,12	50,78	69,51	86,61	47,49	67,65
Jambi	85,52	49,49	67,87	85,35	52,37	69,21	86,17	49,10	68,02
Sumatera Selatan	85,40	53,59	69,71	85,40	58,10	71,94	84,73	58,76	71,92
Bengkulu	86,50	58,01	72,54	87,29	60,85	74,33	86,58	58,64	72,89
Lampung	86,66	51,68	69,69	86,87	53,00	70,44	87,07	54,53	71,29
Kep. Bangka Belitung	88,67	50,99	70,65	88,12	52,49	71,08	87,57	49,24	69,24
Kepulauan Riau	88,03	52,89	70,90	87,90	52,27	70,53	87,01	52,33	70,10
DKI Jakarta	84,35	54,15	69,40	83,13	53,46	68,44	84,53	54,14	69,49
Jawa Barat	85,31	41,65	63,78	85,46	41,97	64,01	85,94	44,04	65,27
Jawa Tengah	84,87	58,33	71,36	84,20	57,51	70,61	85,23	57,00	70,86
DI Yogyakarta	78,97	57,09	67,78	79,29	59,71	69,27	79,15	61,29	70,02
Jawa Timur	85,47	55,08	69,89	85,20	55,78	70,12	84,50	55,21	69,49
Banten	84,91	51,87	68,72	86,64	49,89	68,62	87,00	48,63	68,19
Bali	84,55	69,42	76,98	85,45	72,38	78,91	84,95	71,13	78,03
Nusa Tenggara Barat	83,74	53,80	67,95	84,07	58,04	70,35	84,71	55,85	69,49
Nusa Tenggara Timur	82,58	61,88	71,94	84,06	66,33	74,95	84,17	61,14	72,34
Kalimantan Barat	86,78	60,40	73,86	85,60	59,68	72,91	86,63	58,46	72,84
Kalimantan Tengah	89,28	58,72	74,75	87,44	56,27	72,63	86,24	54,15	70,99
Kalimantan Selatan	86,08	54,88	70,56	86,06	57,57	71,88	86,82	54,88	70,93
Kalimantan Timur	89,74	43,70	68,16	88,78	47,86	69,60	90,67	47,71	70,54
Sulawesi Utara	85,09	46,13	65,93	84,70	43,88	64,63	84,58	45,23	65,23
Sulawesi Tengah	87,34	55,17	71,62	87,57	55,27	71,79	87,57	52,76	70,57
Sulawesi Selatan	83,37	44,80	63,19	82,77	46,08	63,58	82,83	47,44	64,31
Sulawesi Tenggara	85,03	54,47	69,61	84,24	55,19	69,58	84,59	55,51	69,92
Gorontalo	85,16	44,09	64,49	83,75	45,16	64,33	85,65	50,32	67,88
Sulawesi Barat	86,66	62,23	74,32	85,09	59,99	72,41	86,01	61,93	73,84
Maluku	80,94	53,44	67,17	81,90	54,32	68,09	80,45	53,86	67,13
Maluku Utara	83,58	50,80	67,52	84,50	50,62	67,90	83,53	49,66	66,94
Papua Barat	81,06	56,96	69,85	80,69	53,95	68,25	81,07	53,52	68,26
Papua	89,18	68,68	79,52	88,56	70,92	80,25	87,32	70,61	79,45
Indonesia	85,32	52,67	68,96	85,12	53,36	69,21	85,31	53,26	69,26

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 250	676	1 925	1 224	719	1 944	1 229	716	1 945
Sumatera Utara	3 623	2 485	6 107	3 553	2 511	6 064	3 562	2 507	6 069
Sumatera Barat	1 328	913	2 241	1 319	920	2 239	1 321	911	2 232
Riau	1 735	822	2 557	1 758	941	2 699	1 749	863	2 612
Jambi	966	535	1 501	967	570	1 536	982	535	1 517
Sumatera Selatan	2 223	1 337	3 561	2 236	1 455	3 691	2 238	1 468	3 705
Bengkulu	531	338	869	539	361	901	534	349	882
Lampung	2 359	1 287	3 646	2 366	1 322	3 688	2 395	1 354	3 749
Kep. Bangka Belitung	423	216	639	416	225	641	424	216	639
Kepulauan Riau	580	323	904	577	311	888	589	311	901
DKI Jakarta	2 933	1 784	4 716	2 899	1 752	4 651	2 948	1 803	4 751
Jawa Barat	12 591	5 920	18 512	12 566	6 007	18 573	12 736	6 366	19 102
Jawa Tengah	9 463	6 692	16 155	9 359	6 609	15 968	9 495	6 558	16 053
DI Yogyakarta	1 026	775	1 800	1 031	806	1 837	1 047	841	1 888
Jawa Timur	11 529	7 671	19 200	11 442	7 850	19 291	11 361	7 779	19 140
Banten	3 154	1 758	4 912	3 164	1 759	4 923	3 215	1 726	4 941
Bali	1 252	1 028	2 280	1 271	1 080	2 351	1 269	1 066	2 335
Nusa Tenggara Barat	1 210	825	2 036	1 204	912	2 115	1 213	881	2 094
Nusa Tenggara Timur	1 214	949	2 163	1 242	1 025	2 266	1 233	941	2 174
Kalimantan Barat	1 296	879	2 175	1 294	861	2 156	1 306	836	2 142
Kalimantan Tengah	732	419	1 151	718	418	1 136	701	397	1 098
Kalimantan Selatan	1 124	691	1 815	1 124	738	1 862	1 134	707	1 841
Kalimantan Timur	1 182	503	1 684	1 170	552	1 722	1 209	559	1 768
Sulawesi Utara	690	337	1 027	688	323	1 011	689	333	1 022
Sulawesi Tengah	807	472	1 279	804	484	1 288	807	464	1 272
Sulawesi Selatan	2 170	1 239	3 409	2 140	1 269	3 409	2 167	1 319	3 486
Sulawesi Tenggara	620	397	1 017	617	406	1 024	621	416	1 037
Gorontalo	306	156	463	301	159	460	311	181	492
Sulawesi Barat	331	242	573	328	234	562	332	244	576
Maluku	400	261	661	404	262	666	402	262	664
Maluku Utara	290	158	447	295	161	456	293	156	449
Papua Barat	227	139	365	225	133	358	228	133	361
Papua	955	655	1 611	964	682	1 646	958	690	1 648
Indonesia	70 520	42 883	113 402	70 206	43 815	114 021	70 697	43 889	114 586

Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	78,53	41,48	59,79	76,56	43,94	60,06	76,44	43,51	59,78
Sumatera Utara	83,17	55,25	68,98	81,41	55,71	68,35	81,43	55,53	68,28
Sumatera Barat	80,45	52,48	66,10	79,70	52,75	65,88	79,57	52,13	65,49
Riau	83,79	42,23	63,65	84,21	47,96	66,64	83,10	43,61	63,97
Jambi	83,27	48,07	66,03	82,84	50,89	67,20	83,70	47,52	65,99
Sumatera Selatan	81,13	50,16	65,86	81,25	54,36	67,99	81,01	54,62	68,00
Bengkulu	84,36	55,97	70,44	85,42	59,58	72,76	84,29	57,26	71,05
Lampung	83,27	48,22	66,26	83,32	49,38	66,86	84,13	50,46	67,80
Kep. Bangka Belitung	87,53	48,74	68,98	85,48	50,47	68,74	86,40	48,02	68,05
Kepulauan Riau	85,15	49,81	67,92	83,70	47,44	66,02	84,48	46,93	66,18
DKI Jakarta	77,20	47,89	62,69	76,10	46,90	61,64	77,16	48,12	62,78
Jawa Barat	78,32	37,84	58,35	77,85	38,24	58,31	78,58	40,36	59,73
Jawa Tengah	80,53	54,90	67,48	79,62	54,21	66,68	80,77	53,77	67,02
DI Yogyakarta	76,33	55,07	65,45	76,56	57,17	66,64	77,59	59,53	68,36
Jawa Timur	82,63	52,29	67,08	81,90	53,44	67,32	81,23	52,90	66,71
Banten	78,00	45,22	61,93	77,77	44,97	61,70	78,54	43,85	61,54
Bali	82,92	67,94	75,42	83,80	71,05	77,42	83,26	69,85	76,55
Nusa Tenggara Barat	80,75	49,37	64,21	80,14	54,41	66,57	80,55	52,48	65,75
Nusa Tenggara Timur	81,29	60,19	70,45	82,75	64,64	73,45	81,77	59,14	70,15
Kalimantan Barat	83,38	58,92	71,40	83,13	57,66	70,66	83,76	55,89	70,11
Kalimantan Tengah	87,94	55,52	72,53	85,90	55,20	71,31	83,57	52,28	68,69
Kalimantan Selatan	83,37	51,72	67,63	82,99	55,01	69,07	83,38	52,49	68,01
Kalimantan Timur	82,63	39,85	62,58	81,12	43,37	63,43	83,09	43,58	64,58
Sulawesi Utara	80,77	40,82	61,13	80,35	38,93	59,98	80,21	40,11	60,49
Sulawesi Tengah	85,95	52,71	69,72	85,31	53,73	69,89	85,28	51,36	68,71
Sulawesi Selatan	80,09	41,70	60,01	78,81	42,60	59,87	79,63	44,20	61,09
Sulawesi Tenggara	82,47	51,93	67,06	81,71	52,89	67,17	81,82	53,93	67,75
Gorontalo	83,02	41,73	62,24	81,07	42,30	61,56	83,47	47,85	65,55
Sulawesi Barat	85,02	60,89	72,83	83,76	58,43	70,96	84,34	60,62	72,36
Maluku	76,85	49,95	63,38	77,21	49,85	63,51	76,31	49,50	62,89
Maluku Utara	80,43	45,58	63,36	81,45	46,15	64,16	80,51	44,58	62,91
Papua Barat	77,71	54,66	66,99	76,57	52,14	65,20	76,98	51,46	65,11
Papua	86,66	66,78	77,30	86,34	68,62	78,00	84,75	68,56	77,12
Indonesia	80,95	49,05	64,97	80,32	49,97	65,12	80,63	49,89	65,23

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	34,76	32,67	33,56	4,86	4,83	4,02	35,74	36,85	36,92
Sumatera Utara	31,92	32,60	32,32	3,47	3,58	3,88	35,40	34,37	34,92
Sumatera Barat	29,91	29,81	29,71	4,86	5,61	5,48	38,23	38,02	39,07
Riau	41,45	41,61	40,73	4,81	4,29	4,73	32,38	32,15	32,63
Jambi	36,44	35,34	35,84	4,21	4,60	5,20	35,00	33,14	34,78
Sumatera Selatan	34,19	30,83	29,86	3,32	3,17	2,57	36,93	37,55	37,32
Bengkulu	26,54	25,35	23,37	3,71	3,60	3,48	39,36	38,86	40,76
Lampung	24,76	25,03	25,53	4,02	3,51	3,23	39,37	38,98	37,47
Kep. Bangka Belitung	40,51	41,74	43,11	7,62	8,70	8,11	31,79	31,84	31,86
Kepulauan Riau	66,48	65,16	65,50	3,27	3,22	3,53	23,51	23,55	24,95
DKI Jakarta	69,45	69,99	68,81	4,86	3,61	4,36	19,01	19,31	20,57
Jawa Barat	42,62	43,99	42,54	3,56	3,43	3,78	29,59	29,91	29,14
Jawa Tengah	32,56	33,34	33,05	3,63	3,44	3,46	34,13	34,31	34,66
DI Yogyakarta	40,57	40,05	40,20	5,05	4,05	5,68	31,50	33,33	31,25
Jawa Timur	30,76	30,70	32,08	3,59	3,63	3,70	32,75	34,49	33,84
Banten	53,27	53,60	54,65	3,46	3,04	4,73	26,36	25,54	25,02
Bali	39,58	38,74	39,96	3,45	3,22	3,77	32,65	32,48	32,18
Nusa Tenggara Barat	23,36	21,33	23,31	3,91	2,93	2,84	41,14	41,67	39,23
Nusa Tenggara Timur	17,92	15,98	17,85	1,25	1,45	2,02	42,91	41,71	42,10
Kalimantan Barat	30,25	28,85	31,88	2,98	3,18	2,51	37,46	38,10	37,15
Kalimantan Tengah	37,01	35,01	38,34	3,36	2,86	2,58	35,78	36,76	35,26
Kalimantan Selatan	35,65	34,11	34,09	3,19	3,08	3,23	38,40	37,62	39,72
Kalimantan Timur	57,66	56,35	54,06	4,22	4,21	4,76	24,77	25,53	26,47
Sulawesi Utara	36,82	35,61	35,50	4,25	5,08	3,92	37,27	38,03	38,54
Sulawesi Tengah	28,03	28,14	27,07	4,05	3,25	4,84	38,92	40,72	38,07
Sulawesi Selatan	31,57	30,92	31,82	4,10	4,24	3,74	41,12	41,80	40,58
Sulawesi Tenggara	29,51	29,90	30,53	3,49	3,18	2,94	38,06	39,05	38,89
Gorontalo	32,90	33,26	31,25	4,90	4,47	3,30	39,59	41,12	42,73
Sulawesi Barat	24,70	22,54	21,77	3,63	2,53	1,64	43,81	43,92	45,55
Maluku	25,33	25,01	26,75	2,83	2,23	1,94	44,48	44,52	46,22
Maluku Utara	30,14	32,59	30,84	2,54	2,72	3,54	40,93	41,43	40,66
Papua Barat	34,22	35,91	36,65	2,63	1,73	1,62	37,17	35,57	38,58
Papua	17,04	16,95	18,29	1,19	1,27	1,58	43,98	42,39	41,16
Indonesia	36,47	36,45	36,63	3,70	3,53	3,73	33,41	33,78	33,53

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	5,87	7,63	5,56	18,76	18,01	19,94	60,38	62,50	62,42
Sumatera Utara	6,31	6,27	6,40	22,89	23,18	22,48	64,61	63,82	63,80
Sumatera Barat	11,90	10,50	9,85	15,10	16,05	15,88	65,22	64,57	64,80
Riau	7,70	7,33	7,64	13,67	14,61	14,27	53,74	54,10	54,55
Jambi	5,71	8,13	6,95	18,64	18,79	17,24	59,35	60,05	58,96
Sumatera Selatan	4,63	5,03	5,31	20,94	23,42	24,94	62,50	66,00	67,56
Bengkulu	7,21	5,92	7,58	23,18	26,28	24,81	69,75	71,05	73,15
Lampung	10,55	11,57	11,60	21,30	20,92	22,17	71,22	71,46	71,24
Kep. Bangka Belitung	4,96	4,13	4,11	15,12	13,59	12,81	51,87	49,56	48,78
Kepulauan Riau	2,27	2,36	1,54	4,47	5,71	4,49	30,24	31,62	30,97
DKI Jakarta	2,46	2,77	2,39	4,22	4,32	3,86	25,69	26,40	26,83
Jawa Barat	16,23	14,39	16,19	7,99	8,28	8,36	53,81	52,58	53,68
Jawa Tengah	15,21	15,15	14,92	14,47	13,76	13,91	63,81	63,22	63,50
DI Yogyakarta	9,09	8,99	8,23	13,80	13,59	14,64	54,39	55,90	54,12
Jawa Timur	14,52	12,30	12,56	18,37	18,87	17,82	65,64	65,67	64,22
Banten	8,82	9,68	8,17	8,09	8,13	7,43	43,27	43,36	40,62
Bali	9,27	9,68	9,18	15,05	15,87	14,91	56,97	58,04	56,27
Nusa Tenggara Barat	12,85	13,33	14,67	18,74	20,75	19,95	72,73	75,75	73,85
Nusa Tenggara Timur	4,44	4,14	4,69	33,48	36,72	33,34	80,83	82,57	80,12
Kalimantan Barat	2,81	2,91	3,99	26,49	26,96	24,47	66,77	67,97	65,61
Kalimantan Tengah	2,69	4,25	4,37	21,17	21,12	19,45	59,63	62,13	59,08
Kalimantan Selatan	5,38	5,75	6,27	17,38	19,44	16,70	61,16	62,81	62,69
Kalimantan Timur	2,60	2,13	3,56	10,76	11,78	11,14	38,12	39,44	41,17
Sulawesi Utara	10,01	10,08	11,56	11,64	11,20	10,49	58,93	59,31	60,58
Sulawesi Tengah	9,16	8,72	8,47	19,83	19,17	21,54	67,92	68,61	68,09
Sulawesi Selatan	4,75	4,35	5,64	18,46	18,69	18,22	64,33	64,84	64,44
Sulawesi Tenggara	3,51	3,24	3,50	25,43	24,62	24,14	67,00	66,92	66,53
Gorontalo	11,43	9,23	10,05	11,18	11,92	12,67	62,20	62,26	65,46
Sulawesi Barat	3,86	4,39	4,90	24,00	26,61	26,14	71,67	74,92	76,60
Maluku	2,46	1,57	1,60	24,89	26,67	23,50	71,84	72,76	71,32
Maluku Utara	3,62	4,36	5,51	22,78	18,90	19,45	67,33	64,69	65,62
Papua Barat	1,36	2,49	1,30	24,63	24,29	21,85	63,15	62,36	61,73
Papua	1,75	1,78	2,20	36,04	37,61	36,77	81,77	81,77	80,13
Indonesia	10,61	10,02	10,36	15,81	16,22	15,75	59,83	60,02	59,64

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2012–2013

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,50	11,11	38,39	50,83	10,65	38,52	50,80	10,90	38,30
Sumatera Utara	49,07	12,34	38,59	49,39	11,72	38,89	48,62	11,69	39,69
Sumatera Barat	40,22	15,40	44,37	41,23	14,64	44,14	42,07	13,74	44,19
Riau	45,44	13,13	41,43	46,28	11,48	42,25	46,01	11,48	42,51
Jambi	54,41	8,66	36,93	54,19	9,11	36,70	51,90	7,42	40,68
Sumatera Selatan	51,91	11,67	36,42	52,96	11,50	35,53	55,53	11,98	32,49
Bengkulu	59,42	8,94	31,64	60,22	8,46	31,32	59,41	7,36	33,23
Lampung	47,14	15,13	37,73	49,61	12,14	38,25	52,17	11,43	36,40
Kep. Bangka Belitung	27,90	30,65	41,45	26,18	29,85	43,96	24,13	33,17	42,70
Kepulauan Riau	14,15	26,11	59,74	13,18	27,39	59,43	13,23	32,19	54,59
DKI Jakarta	1,64	16,74	81,62	1,07	17,85	81,08	1,43	17,38	81,19
Jawa Barat	18,92	29,70	51,38	19,61	28,97	51,43	21,27	28,13	50,60
Jawa Tengah	29,46	28,84	41,71	30,30	28,49	41,21	30,52	28,39	41,09
DI Yogyakarta	22,77	24,33	52,90	23,43	21,18	55,39	23,00	20,88	56,12
Jawa Timur	38,15	22,21	39,64	38,25	21,96	39,79	38,47	21,42	40,11
Banten	14,56	28,77	56,67	14,35	29,00	56,65	15,48	27,20	57,31
Bali	25,02	23,56	51,41	24,69	22,68	52,63	25,31	22,20	52,49
Nusa Tenggara Barat	38,66	17,13	44,21	43,37	14,63	42,00	45,34	13,08	41,58
Nusa Tenggara Timur	62,98	12,11	24,91	67,69	8,18	24,13	66,38	8,57	25,05
Kalimantan Barat	62,82	10,36	26,82	60,30	11,59	28,11	57,86	12,13	30,00
Kalimantan Tengah	52,53	14,90	32,57	53,80	13,86	32,34	53,14	13,80	33,06
Kalimantan Selatan	36,10	23,09	40,81	38,60	22,55	38,86	37,74	20,84	41,41
Kalimantan Timur	26,07	21,35	52,58	26,66	21,65	51,69	26,13	20,95	52,92
Sulawesi Utara	31,28	21,00	47,72	31,41	18,21	50,37	33,77	16,47	49,77
Sulawesi Tengah	47,17	16,89	35,94	47,40	15,58	37,02	50,45	12,92	36,63
Sulawesi Selatan	41,02	14,93	44,05	41,39	13,38	45,24	41,78	12,94	45,29
Sulawesi Tenggara	42,26	16,17	41,57	42,26	15,27	42,47	43,27	12,95	43,77
Gorontalo	34,27	20,39	45,34	35,13	16,28	48,59	34,84	15,56	49,60
Sulawesi Barat	59,33	9,56	31,11	58,77	9,30	31,93	59,93	10,15	29,91
Maluku	49,41	13,65	36,94	50,09	10,71	39,20	51,28	9,85	38,87
Maluku Utara	52,31	9,36	38,33	48,77	11,58	39,65	48,91	12,05	39,04
Papua Barat	50,75	10,61	38,64	48,42	11,07	40,51	48,05	8,79	43,16
Papua	73,21	3,74	23,06	73,05	4,49	22,46	73,78	3,64	22,57
Indonesia	34,38	21,28	44,34	35,05	20,59	44,36	35,43	20,14	44,43

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2012–2013

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	550	516	564	28,56	26,54	29,01	51,52	57,08	54,41
Sumatera Utara	1 660	1 266	1 226	27,18	20,87	20,19	58,08	58,04	58,63
Sumatera Barat	568	465	498	25,36	20,76	22,31	54,47	55,89	56,36
Riau	738	825	730	28,87	30,56	27,94	48,88	50,89	50,21
Jambi	490	603	498	32,63	39,27	32,80	47,41	47,20	47,57
Sumatera Selatan	1 012	918	856	28,42	24,88	23,10	51,34	52,69	53,91
Bengkulu	196	220	200	22,50	24,44	22,65	56,69	54,69	56,28
Lampung	1 037	895	859	28,43	24,27	22,92	50,53	52,35	50,17
Kep. Bangka Belitung	140	147	124	21,87	22,95	19,44	59,91	55,50	56,54
Kepulauan Riau	129	134	123	14,27	15,13	13,64	54,08	55,50	53,84
DKI Jakarta	321	242	349	6,80	5,20	7,34	67,73	60,54	59,11
Jawa Barat	2 808	2 346	2 660	15,17	12,63	13,92	57,12	53,38	52,16
Jawa Tengah	3 270	2 688	2 762	20,24	16,83	17,21	60,84	60,17	56,83
DI Yogyakarta	341	361	406	18,97	19,65	21,50	63,58	57,89	63,71
Jawa Timur	4 362	3 821	3 837	22,72	19,81	20,05	59,64	60,81	59,57
Banten	518	548	543	10,55	11,13	11,00	67,24	62,55	63,23
Bali	482	481	485	21,15	20,48	20,78	61,68	60,55	58,12
Nusa Tenggara Barat	422	421	468	20,74	19,89	22,36	56,99	60,12	61,20
Nusa Tenggara Timur	837	836	799	38,71	36,90	36,76	59,70	59,35	58,89
Kalimantan Barat	653	645	691	30,03	29,92	32,26	56,36	55,79	58,48
Kalimantan Tengah	277	242	275	24,10	21,28	25,08	58,86	58,61	58,52
Kalimantan Selatan	591	478	409	32,54	25,67	22,19	55,34	58,71	55,75
Kalimantan Timur	244	204	236	14,47	11,84	13,36	49,88	52,74	55,33
Sulawesi Utara	220	171	181	21,44	16,91	17,76	50,99	51,16	49,34
Sulawesi Tengah	366	350	343	28,61	27,21	27,00	54,93	57,53	57,57
Sulawesi Selatan	1 059	882	861	31,06	25,86	24,69	48,64	49,17	52,25
Sulawesi Tenggara	310	285	289	30,43	27,82	27,86	56,29	59,91	59,45
Gorontalo	94	84	107	20,26	18,38	21,81	58,54	60,25	57,47
Sulawesi Barat	235	225	233	40,93	40,08	40,44	54,51	52,05	53,61
Maluku	169	198	192	25,50	29,74	28,89	60,09	57,90	60,09
Maluku Utara	136	133	108	30,30	29,09	24,08	51,07	51,52	54,19
Papua Barat	77	75	86	21,10	20,92	23,88	60,94	66,02	61,88
Papua	525	445	466	32,56	27,00	28,26	54,16	55,42	52,29
Indonesia	24 835	22 149	22 465	21,90	19,43	19,61	56,94	56,81	56,23

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,80	2,63	2,31	7,97	8,07	7,42	17,40	18,10	18,65
Sumatera Utara	2,05	2,12	1,68	7,56	6,67	6,08	13,59	12,76	13,42
Sumatera Barat	3,10	2,03	1,61	7,24	8,40	7,09	13,73	13,97	15,07
Riau	3,42	2,06	1,77	8,57	8,62	6,99	15,90	15,42	14,48
Jambi	1,33	2,12	1,99	7,78	9,87	5,98	15,85	17,77	15,92
Sumatera Selatan	3,21	2,01	1,92	5,21	6,32	5,49	13,72	14,86	13,73
Bengkulu	2,87	1,78	2,57	6,82	6,87	6,57	12,00	12,95	11,42
Lampung	3,12	2,67	1,68	7,62	7,61	6,91	14,32	14,26	16,21
Kep. Bangka Belitung	2,16	2,33	3,26	3,24	4,37	4,69	11,44	10,37	8,78
Kepulauan Riau	3,04	1,74	2,75	4,10	4,97	3,66	6,58	5,87	5,56
DKI Jakarta	0,92	0,84	0,59	2,27	2,06	2,13	3,39	3,98	4,44
Jawa Barat	1,91	1,85	1,29	3,91	4,25	3,97	8,73	8,58	9,13
Jawa Tengah	2,72	2,79	2,02	5,55	5,93	5,24	9,94	9,89	9,80
DI Yogyakarta	2,30	1,31	1,35	6,68	6,54	6,93	8,23	8,15	7,70
Jawa Timur	1,45	1,44	1,10	5,85	6,88	6,82	12,04	12,04	11,62
Banten	1,82	2,13	1,21	3,54	3,25	3,44	5,96	8,00	7,92
Bali	1,62	1,37	1,06	4,95	4,92	4,33	8,92	8,44	9,05
Nusa Tenggara Barat	2,94	2,06	2,21	7,88	8,36	9,01	15,16	13,88	15,54
Nusa Tenggara Timur	3,20	2,19	2,33	10,02	9,10	10,37	19,52	17,14	18,73
Kalimantan Barat	1,11	0,94	0,90	4,95	4,61	3,45	17,68	16,44	18,45
Kalimantan Tengah	2,00	1,95	1,44	6,27	6,45	6,55	13,19	12,16	12,08
Kalimantan Selatan	2,40	2,45	2,25	8,07	6,44	6,17	14,89	15,50	15,24
Kalimantan Timur	1,35	1,29	1,52	2,73	3,35	3,45	6,72	6,69	7,43
Sulawesi Utara	1,79	2,99	1,01	5,07	4,72	5,31	12,18	11,57	10,79
Sulawesi Tengah	4,23	3,99	3,14	9,37	9,38	8,28	14,08	12,31	11,86
Sulawesi Selatan	4,22	2,50	2,40	11,11	10,99	8,99	15,93	15,62	16,05
Sulawesi Tenggara	4,05	3,04	3,46	9,89	8,22	8,22	14,76	15,49	15,16
Gorontalo	5,17	5,41	2,44	6,50	5,98	5,45	10,50	9,65	11,39
Sulawesi Barat	5,26	4,40	4,25	15,67	19,45	18,18	21,11	16,23	20,15
Maluku	2,64	2,52	2,91	6,87	7,64	6,17	12,12	14,72	14,90
Maluku Utara	2,48	4,20	2,39	8,36	6,95	6,41	18,15	15,38	16,89
Papua Barat	3,31	2,25	2,93	4,35	3,94	4,68	13,75	13,11	14,27
Papua	0,72	0,64	0,45	2,73	7,03	6,02	14,41	16,02	16,14
Indonesia	2,22	2,02	1,60	5,83	6,18	5,72	11,43	11,42	11,58

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	20,17	19,35	19,37	13,37	11,86	12,97	20,35	20,87	20,71
Sumatera Utara	16,25	16,19	16,57	13,48	12,88	12,07	26,77	28,98	28,54
Sumatera Barat	14,93	14,31	15,45	11,20	10,20	11,38	23,19	24,97	25,79
Riau	15,37	15,45	16,15	8,58	10,99	10,58	22,67	22,34	25,90
Jambi	22,63	23,91	23,56	17,73	12,53	14,40	20,62	19,13	20,71
Sumatera Selatan	18,24	17,78	17,87	12,64	13,61	13,00	24,97	24,24	26,81
Bengkulu	14,97	13,90	12,55	12,47	11,17	13,44	31,95	30,69	24,95
Lampung	16,34	15,67	14,68	10,71	10,27	9,12	22,03	24,16	24,71
Kep. Bangka Belitung	14,19	13,96	14,06	8,00	9,51	8,70	37,29	34,59	33,89
Kepulauan Riau	8,30	7,94	8,50	6,51	7,76	6,39	40,90	40,72	42,07
DKI Jakarta	4,19	5,24	4,48	5,20	4,33	4,40	47,02	47,12	47,71
Jawa Barat	10,88	10,74	11,96	8,23	9,28	8,89	35,16	35,38	34,99
Jawa Tengah	12,96	12,52	12,53	9,05	9,32	8,96	30,54	30,28	31,18
DI Yogyakarta	9,68	9,56	11,76	9,94	9,70	10,47	33,78	36,86	33,99
Jawa Timur	14,01	14,22	13,88	10,66	9,77	10,44	26,55	26,98	28,13
Banten	8,75	10,49	8,54	8,43	7,14	6,53	44,93	43,97	45,43
Bali	10,37	10,64	11,47	9,81	8,55	8,88	26,91	27,29	27,44
Nusa Tenggara Barat	17,52	16,75	13,48	8,90	10,08	10,11	22,17	23,31	23,89
Nusa Tenggara Timur	20,18	22,93	18,41	14,25	14,13	12,25	21,03	22,26	24,22
Kalimantan Barat	16,40	17,92	19,35	13,79	13,43	11,85	26,30	28,34	27,99
Kalimantan Tengah	14,94	14,46	17,65	9,21	10,49	11,31	27,15	28,21	26,54
Kalimantan Selatan	18,28	16,06	15,52	12,21	11,73	12,37	24,83	24,80	26,66
Kalimantan Timur	10,71	9,85	9,57	9,99	9,74	11,89	27,16	31,41	30,49
Sulawesi Utara	12,33	11,94	11,83	10,73	10,99	11,37	34,38	36,29	35,70
Sulawesi Tengah	16,13	16,25	18,51	12,68	13,93	13,61	20,69	22,31	23,26
Sulawesi Selatan	15,29	16,68	15,85	11,08	10,43	11,67	19,53	20,83	20,99
Sulawesi Tenggara	16,17	14,93	16,30	11,38	11,46	11,36	20,33	22,67	20,56
Gorontalo	11,22	12,33	12,41	14,58	13,06	10,91	24,29	25,21	25,57
Sulawesi Barat	19,40	18,62	17,31	10,83	8,83	8,60	14,50	18,02	16,01
Maluku	15,52	17,60	18,39	15,13	15,16	13,36	27,45	23,41	24,46
Maluku Utara	21,03	21,32	18,05	14,14	13,79	14,45	21,37	20,09	26,20
Papua Barat	16,75	14,83	15,39	11,85	12,33	12,29	25,16	29,97	28,58
Papua	24,92	22,27	24,26	21,47	18,96	17,95	22,80	22,72	23,01
Indonesia	13,67	13,72	13,72	10,32	10,17	10,09	29,38	29,84	30,40

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi (1)	49–59 jam			60 jam keatas		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	11,19	11,52	11,01	7,75	7,60	7,54
Sumatera Utara	9,20	10,95	10,61	11,10	9,46	11,03
Sumatera Barat	16,71	15,06	13,73	9,91	11,06	9,87
Riau	13,55	11,25	11,97	11,94	13,87	12,16
Jambi	8,94	8,08	10,10	5,12	6,59	7,33
Sumatera Selatan	13,62	12,77	12,51	8,38	8,41	8,67
Bengkulu	12,92	16,13	19,06	6,00	6,52	9,44
Lampung	17,41	17,26	18,52	8,44	8,10	8,17
Kep. Bangka Belitung	15,19	15,73	18,03	8,49	9,14	8,59
Kepulauan Riau	19,13	19,04	18,87	11,43	11,96	12,21
DKI Jakarta	16,56	17,33	16,66	20,43	19,10	19,58
Jawa Barat	15,94	15,52	15,78	15,24	14,41	13,98
Jawa Tengah	18,18	17,90	18,36	11,06	11,37	11,92
DI Yogyakarta	18,58	18,89	17,64	10,80	8,98	10,17
Jawa Timur	17,83	17,28	17,05	11,60	11,38	10,96
Banten	13,46	13,16	14,55	13,11	11,86	12,38
Bali	21,84	22,29	21,42	15,58	16,50	16,36
Nusa Tenggara Barat	14,98	17,04	16,80	10,46	8,51	8,96
Nusa Tenggara Timur	6,62	7,19	7,88	5,19	5,05	5,81
Kalimantan Barat	13,58	12,15	11,34	6,18	6,17	6,66
Kalimantan Tengah	13,98	14,94	11,96	13,27	11,34	12,47
Kalimantan Selatan	10,44	13,20	12,90	8,88	9,82	8,89
Kalimantan Timur	19,53	17,93	16,73	21,81	19,75	18,91
Sulawesi Utara	13,54	11,65	12,45	9,98	9,85	11,53
Sulawesi Tengah	13,38	13,02	13,09	9,43	8,81	8,25
Sulawesi Selatan	13,56	13,84	14,94	9,28	9,10	9,09
Sulawesi Tenggara	15,72	15,21	15,07	7,71	8,98	9,87
Gorontalo	15,80	16,29	18,40	11,95	12,07	13,42
Sulawesi Barat	9,07	9,60	10,55	4,16	4,86	4,95
Maluku	9,43	10,35	10,09	10,84	8,60	9,71
Maluku Utara	10,44	11,33	9,74	4,03	6,95	5,87
Papua Barat	11,84	12,46	13,12	13,00	11,12	8,74
Papua	5,78	5,76	6,27	7,17	6,60	5,91
Indonesia	15,39	15,25	15,38	11,76	11,40	11,51

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2012–2013

Provinsi	Formal			Informal		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,41	41,64	41,09	56,59	58,36	58,91
Sumatera Utara	40,49	41,32	41,12	59,51	58,68	58,88
Sumatera Barat	41,27	42,18	41,78	58,73	57,82	58,22
Riau	50,31	49,95	50,08	49,69	50,05	49,92
Jambi	45,71	44,55	45,86	54,29	55,45	54,14
Sumatera Selatan	41,84	38,96	36,57	58,16	61,04	63,43
Bengkulu	34,56	34,13	32,53	65,44	65,87	67,47
Lampung	35,90	35,44	35,01	64,10	64,56	64,99
Kep. Bangka Belitung	54,43	56,33	57,27	45,57	43,67	42,73
Kepulauan Riau	72,60	71,74	71,72	27,40	28,26	28,28
DKI Jakarta	79,02	79,06	78,74	20,98	20,94	21,26
Jawa Barat	53,05	54,29	52,80	46,95	45,71	47,20
Jawa Tengah	43,84	44,56	43,83	56,16	55,44	56,17
DI Yogyakarta	53,56	53,68	56,23	46,44	46,32	43,77
Jawa Timur	41,19	41,76	42,45	58,81	58,24	57,55
Banten	63,65	62,89	64,51	36,35	37,11	35,49
Bali	52,19	51,46	51,70	47,81	48,54	48,30
Nusa Tenggara Barat	35,77	32,05	34,34	64,23	67,95	65,66
Nusa Tenggara Timur	22,72	20,41	22,38	77,28	79,59	77,62
Kalimantan Barat	36,58	36,35	38,22	63,42	63,65	61,78
Kalimantan Tengah	45,68	43,42	46,00	54,32	56,58	54,00
Kalimantan Selatan	45,61	44,12	43,63	54,39	55,88	56,37
Kalimantan Timur	67,01	65,75	63,48	32,99	34,25	36,52
Sulawesi Utara	46,10	45,72	43,10	53,90	54,28	56,90
Sulawesi Tengah	38,73	37,56	37,87	61,27	62,44	62,13
Sulawesi Selatan	43,03	43,02	42,85	56,97	56,98	57,15
Sulawesi Tenggara	39,81	40,07	40,58	60,19	59,93	59,42
Gorontalo	44,25	45,20	41,06	55,75	54,80	58,94
Sulawesi Barat	34,74	32,50	30,23	65,26	67,50	69,77
Maluku	34,45	32,96	33,66	65,55	67,04	66,34
Maluku Utara	36,70	39,76	37,06	63,30	60,24	62,94
Papua Barat	40,34	41,58	42,32	59,66	58,42	57,68
Papua	20,68	20,53	21,66	79,32	79,47	78,34
Indonesia	46,51	46,52	46,44	53,49	53,48	53,56

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(persen)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,89	11,98	8,74	7,23	10,28	8,38	6,38	10,16	7,81
Sumatera Utara	3,86	8,59	5,84	4,91	7,52	6,01	4,83	7,52	5,96
Sumatera Barat	5,11	6,79	5,80	5,78	7,11	6,33	6,04	7,14	6,49
Riau	3,84	7,64	5,10	3,35	5,57	4,13	4,05	8,17	5,45
Jambi	2,63	2,86	2,71	2,94	2,84	2,90	2,87	3,21	2,99
Sumatera Selatan	5,00	6,39	5,53	4,86	6,44	5,49	4,39	7,04	5,46
Bengkulu	2,47	3,52	2,88	2,15	2,09	2,12	2,64	2,36	2,53
Lampung	3,92	6,71	4,92	4,09	6,83	5,09	3,38	7,46	4,90
Kep. Bangka Belitung	1,29	4,40	2,36	3,00	3,84	3,30	1,33	2,48	1,72
Kepulauan Riau	3,28	5,82	4,20	4,78	9,25	6,39	2,90	10,32	5,60
DKI Jakarta	8,48	11,56	9,67	8,46	12,27	9,94	8,72	11,13	9,65
Jawa Barat	8,20	9,16	8,50	8,91	8,89	8,90	8,56	8,35	8,49
Jawa Tengah	5,11	5,88	5,43	5,44	5,75	5,57	5,24	5,66	5,42
DI Yogyakarta	3,34	3,54	3,43	3,44	4,25	3,80	1,96	2,88	2,37
Jawa Timur	3,32	5,07	4,03	3,87	4,20	4,00	3,87	4,18	4,00
Banten	8,14	12,84	9,88	10,24	9,85	10,10	9,72	9,84	9,76
Bali	1,93	2,12	2,02	1,94	1,84	1,89	1,99	1,80	1,90
Nusa Tenggara Barat	3,57	8,23	5,52	4,69	6,26	5,37	4,91	6,03	5,39
Nusa Tenggara Timur	1,56	2,73	2,08	1,55	2,55	2,01	2,85	3,27	3,03
Kalimantan Barat	3,91	2,47	3,33	2,88	3,39	3,09	3,31	4,40	3,74
Kalimantan Tengah	1,50	5,45	2,98	1,77	1,91	1,82	3,10	3,46	3,23
Kalimantan Selatan	3,14	5,76	4,15	3,56	4,44	3,91	3,96	4,36	4,12
Kalimantan Timur	7,92	8,80	8,19	8,63	9,38	8,87	8,36	8,66	8,46
Sulawesi Utara	5,08	11,50	7,29	5,14	11,29	7,19	5,17	11,32	7,27
Sulawesi Tengah	1,59	4,45	2,66	2,57	2,78	2,65	2,61	2,65	2,63
Sulawesi Selatan	3,93	6,91	5,03	4,78	7,55	5,83	3,86	6,83	5,01
Sulawesi Tenggara	3,02	4,66	3,67	3,00	4,17	3,47	3,28	2,86	3,11
Gorontalo	2,51	5,37	3,49	3,20	6,33	4,31	2,54	4,90	3,42
Sulawesi Barat	1,90	2,16	2,01	1,57	2,61	2,00	1,94	2,11	2,02
Maluku	5,06	6,53	5,64	5,73	8,23	6,73	5,14	8,09	6,33
Maluku Utara	3,77	10,28	6,17	3,60	8,83	5,51	3,62	10,22	6,02
Papua Barat	4,13	4,03	4,09	5,11	3,36	4,47	5,05	3,86	4,62
Papua	2,83	2,76	2,80	2,51	3,25	2,81	2,95	2,90	2,93
Indonesia	5,12	6,86	5,79	5,64	6,36	5,92	5,49	6,32	5,81

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013
(persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,26	6,15	5,62	12,33	11,48	10,85	11,76	11,23	10,30
Sumatera Utara	4,23	4,51	4,66	8,27	8,59	8,48	8,45	7,01	5,45
Sumatera Barat	4,49	5,11	5,46	8,20	9,37	8,30	6,65	5,17	7,27
Riau	3,40	2,29	3,80	8,06	7,34	7,70	5,59	5,14	7,75
Jambi	1,13	2,05	1,85	5,78	3,09	4,26	5,53	7,58	6,45
Sumatera Selatan	3,93	3,69	4,39	9,80	10,48	8,54	5,02	4,39	5,22
Bengkulu	1,31	1,37	1,17	4,02	3,47	4,41	9,67	3,67	6,38
Lampung	3,50	3,88	3,67	9,46	9,12	8,52	4,99	3,78	4,64
Kep. Bangka Belitung	1,76	2,42	1,32	4,37	3,40	1,41	0,00	10,19	6,44
Kepulauan Riau	5,03	6,48	4,51	4,82	7,09	6,97	0,00	4,33	5,37
DKI Jakarta	9,17	9,59	10,02	11,04	12,51	11,45	7,79	5,18	5,69
Jawa Barat	7,22	8,02	8,03	12,71	12,36	10,12	6,00	5,52	7,17
Jawa Tengah	4,91	5,12	4,80	7,78	7,78	7,84	4,37	4,05	4,67
DI Yogyakarta	1,84	1,37	1,36	4,08	3,53	2,32	6,99	11,18	5,15
Jawa Timur	3,21	3,10	3,42	6,58	6,59	6,33	4,22	4,63	2,78
Banten	11,40	10,50	9,99	8,88	11,62	12,39	4,69	4,72	2,92
Bali	1,49	1,94	1,75	2,17	2,24	2,59	4,12	0,89	0,98
Nusa Tenggara Barat	5,58	5,00	4,70	6,74	5,67	7,02	2,11	7,74	6,76
Nusa Tenggara Timur	1,20	1,06	2,24	6,37	5,54	7,45	3,52	5,61	2,75
Kalimantan Barat	2,07	2,38	2,79	9,12	5,18	6,41	2,16	5,22	6,36
Kalimantan Tengah	2,45	1,83	3,25	5,17	1,72	3,65	2,48	1,97	2,19
Kalimantan Selatan	3,35	3,80	3,80	7,09	5,03	6,50	3,92	1,86	1,55
Kalimantan Timur	7,07	10,34	8,82	11,17	8,22	8,62	4,55	5,20	6,60
Sulawesi Utara	5,04	4,69	5,68	11,86	11,84	10,87	6,00	6,98	5,67
Sulawesi Tengah	1,83	2,28	1,39	3,61	3,73	5,80	5,63	2,74	3,29
Sulawesi Selatan	3,51	5,31	4,30	8,92	8,88	8,32	6,01	3,10	2,42
Sulawesi Tenggara	2,91	1,87	1,39	4,86	5,59	5,55	4,94	6,80	6,27
Gorontalo	2,96	3,61	2,79	6,04	7,71	7,43	2,12	2,81	0,96
Sulawesi Barat	1,22	1,11	1,55	4,43	4,86	3,59	3,97	3,62	2,65
Maluku	1,92	3,35	3,26	12,67	13,51	12,75	8,33	7,67	5,34
Maluku Utara	2,53	2,45	1,41	13,29	10,77	15,55	7,83	7,66	5,06
Papua Barat	1,69	2,81	3,02	8,45	7,24	9,03	5,24	5,18	1,06
Papua	1,14	0,98	0,97	8,06	8,56	9,04	6,94	7,78	8,07
Indonesia	4,68	4,91	4,94	8,77	8,78	8,33	5,55	5,22	4,99

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan,
2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	41,40	42,26	40,94	41,34	40,94	41,94	17,26	16,80	17,12
Sumatera Utara	43,66	44,97	45,97	44,13	45,06	45,79	12,21	9,97	8,25
Sumatera Barat	46,53	48,61	49,89	40,87	42,14	37,00	12,59	9,26	13,11
Riau	38,66	32,49	40,32	49,59	53,68	43,84	11,75	13,83	15,84
Jambi	27,18	46,08	39,09	50,91	25,25	36,90	21,92	28,67	24,02
Sumatera Selatan	46,74	44,28	54,64	45,47	49,02	37,91	7,80	6,70	7,45
Bengkulu	29,06	42,12	29,50	35,84	39,92	46,34	35,10	17,96	24,16
Lampung	50,38	53,14	52,00	42,63	41,63	41,70	6,99	5,23	6,29
Kep. Bangka Belitung	50,11	47,48	50,56	49,89	28,46	21,67	0,00	24,06	27,77
Kepulauan Riau	54,94	47,88	37,37	45,06	41,99	48,97	0,00	10,13	13,66
DKI Jakarta	32,56	32,04	33,95	49,45	56,58	52,35	17,98	11,39	13,70
Jawa Barat	56,77	59,55	62,65	37,57	35,09	30,27	5,66	5,36	7,08
Jawa Tengah	66,29	67,35	64,42	27,97	27,58	29,72	5,74	5,06	5,86
DI Yogyakarta	27,15	17,12	27,95	39,60	33,08	32,06	33,25	49,80	39,99
Jawa Timur	55,86	53,87	59,46	35,77	36,64	34,45	8,37	9,49	6,09
Banten	69,54	60,71	59,55	24,57	33,42	36,55	5,90	5,86	3,90
Bali	42,75	58,99	52,28	32,44	34,91	40,89	24,81	6,10	6,82
Nusa Tenggara Barat	69,95	66,11	60,71	26,57	21,56	28,22	3,48	12,33	11,07
Nusa Tenggara Timur	45,83	42,00	58,31	42,63	38,96	35,92	11,55	19,04	5,77
Kalimantan Barat	47,29	57,52	55,07	48,82	30,61	32,46	3,89	11,87	12,46
Kalimantan Tengah	59,19	71,38	70,77	33,54	18,73	22,77	7,27	9,89	6,46
Kalimantan Selatan	58,44	70,90	67,86	34,74	25,83	29,11	6,82	3,27	3,03
Kalimantan Timur	43,07	59,11	51,71	49,08	32,64	38,03	7,85	8,25	10,27
Sulawesi Utara	40,56	37,49	46,40	51,51	51,84	45,69	7,93	10,68	7,91
Sulawesi Tengah	45,29	57,56	34,75	31,32	30,80	51,36	23,39	11,64	13,89
Sulawesi Selatan	45,24	59,41	54,28	39,38	34,00	39,39	15,38	6,60	6,33
Sulawesi Tenggara	49,10	33,43	27,32	31,48	37,79	42,49	19,42	28,79	30,19
Gorontalo	60,40	59,67	58,05	34,18	33,88	38,87	5,41	6,46	3,08
Sulawesi Barat	45,06	40,71	57,19	39,04	45,70	33,66	15,91	13,59	9,15
Maluku	20,75	29,56	30,31	62,79	56,06	60,02	16,46	14,38	9,67
Maluku Utara	24,78	26,17	13,58	60,57	57,64	75,92	14,65	16,19	10,51
Papua Barat	24,28	35,75	38,06	60,11	50,09	59,28	15,62	14,16	2,66
Papua	30,40	26,27	24,73	54,18	56,32	55,75	15,42	17,41	19,51
Indonesia	52,94	53,93	54,99	37,90	37,50	36,52	9,16	8,57	8,49

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57,14	59,19	54,68	34,03	30,94	35,16	8,84	9,87	10,16
Sumatera Utara	63,45	63,82	63,36	31,17	30,73	31,34	5,39	5,45	5,30
Sumatera Barat	69,02	67,26	70,79	21,48	22,66	23,79	9,50	10,07	5,42
Riau	68,14	68,77	66,33	24,92	20,23	23,82	6,94	11,00	9,85
Jambi	64,75	65,90	64,64	24,08	25,47	26,06	11,17	8,63	9,30
Sumatera Selatan	69,74	72,87	72,44	24,69	21,22	23,03	5,57	5,91	4,54
Bengkulu	72,01	66,48	72,68	20,98	26,76	16,86	7,01	6,76	10,46
Lampung	71,02	75,96	76,20	23,09	18,61	22,32	5,90	5,43	1,49
Kep. Bangka Belitung	77,13	71,01	74,11	22,87	27,10	22,87	0,00	1,89	3,02
Kepulauan Riau	70,01	66,33	74,15	29,99	32,93	25,85	0,00	0,74	0,00
DKI Jakarta	37,01	47,40	42,29	36,53	33,65	37,22	26,46	18,95	20,50
Jawa Barat	83,41	81,52	81,50	13,05	13,50	13,37	3,54	4,97	5,13
Jawa Tengah	79,50	82,43	82,43	14,42	12,85	14,12	6,08	4,72	3,45
DI Yogyakarta	56,44	58,85	53,65	30,86	33,62	33,16	12,70	7,52	13,18
Jawa Timur	77,31	77,86	81,41	17,52	17,19	14,99	5,17	4,95	3,60
Banten	76,92	78,10	81,48	15,01	16,53	13,15	8,07	5,37	5,37
Bali	67,82	66,97	67,38	28,20	20,85	23,87	3,98	12,18	8,75
Nusa Tenggara Barat	66,25	74,56	73,59	23,79	18,41	18,62	9,95	7,03	7,79
Nusa Tenggara Timur	82,15	77,56	80,88	11,38	15,57	15,56	6,47	6,87	3,55
Kalimantan Barat	78,15	76,37	73,16	15,20	16,62	20,27	6,65	7,01	6,57
Kalimantan Tengah	77,16	72,08	65,67	18,50	21,75	29,17	4,34	6,17	5,16
Kalimantan Selatan	80,04	81,07	82,72	17,58	14,45	14,22	2,38	4,48	3,06
Kalimantan Timur	55,83	59,38	60,33	34,36	31,98	34,75	9,81	8,64	4,93
Sulawesi Utara	66,71	65,50	62,84	29,65	28,49	34,48	3,64	6,01	2,67
Sulawesi Tengah	73,78	73,44	75,92	19,85	20,15	16,64	6,37	6,41	7,44
Sulawesi Selatan	68,58	67,36	64,53	21,60	22,18	25,82	9,81	10,47	9,65
Sulawesi Tenggara	62,96	70,15	59,45	24,66	21,08	26,29	12,38	8,77	14,26
Gorontalo	79,16	84,09	81,53	17,81	10,24	14,77	3,03	5,67	3,70
Sulawesi Barat	69,22	76,36	70,92	28,10	18,97	21,93	2,68	4,67	7,15
Maluku	51,42	58,40	55,55	42,82	34,30	34,22	5,76	7,30	10,23
Maluku Utara	70,92	61,77	61,71	25,25	30,01	29,16	3,83	8,23	9,13
Papua Barat	75,61	64,56	69,02	16,13	31,16	23,81	8,26	4,28	7,16
Papua	71,55	83,65	89,26	24,86	14,44	9,64	3,58	1,91	1,10
Indonesia	73,51	74,74	75,28	20,12	19,04	19,38	6,37	6,22	5,34

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Menurut Provinsi, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	2012	2013	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 110	1 115	1 144
Sumatera Utara	2 367	2 420	2 435
Sumatera Barat	1 011	1 009	1 021
Riau	1 323	1 235	1 321
Jambi	730	704	735
Sumatera Selatan	1 638	1 523	1 530
Bengkulu	339	318	337
Lampung	1 668	1 631	1 588
Kep. Bangka Belitung	272	270	289
Kepulauan Riau	387	397	407
DKI Jakarta	2 302	2 381	2 309
Jawa Barat	11 492	11 463	11 105
Jawa Tengah	6 857	7 037	6 980
DI Yogyakarta	886	847	828
Jawa Timur	8 617	8 562	8 755
Banten	2 481	2 504	2 554
Bali	696	640	670
Nusa Tenggara Barat	1 016	942	972
Nusa Tenggara Timur	861	773	857
Kalimantan Barat	796	826	830
Kalimantan Tengah	401	436	464
Kalimantan Selatan	790	758	787
Kalimantan Timur	857	825	807
Sulawesi Utara	573	596	587
Sulawesi Tengah	521	520	545
Sulawesi Selatan	2 091	2 074	2 036
Sulawesi Tenggara	461	463	460
Gorontalo	264	266	241
Sulawesi Barat	202	218	208
Maluku	342	335	347
Maluku Utara	229	228	236
Papua Barat	164	175	176
Papua	427	417	439
Indonesia	54 172	53 907	53 999

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(persen)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	15,65	52,88	34,48	17,47	51,02	34,44	18,36	51,57	35,16
Sumatera Utara	13,49	39,56	26,74	14,38	39,76	27,28	14,43	39,95	27,40
Sumatera Barat	15,22	43,70	29,83	15,42	43,21	29,68	15,32	43,86	29,96
Riau	12,87	54,27	32,93	12,88	49,22	30,49	13,39	52,51	32,35
Jambi	14,48	50,51	32,13	14,65	47,63	30,79	13,83	50,90	31,98
Sumatera Selatan	14,60	46,41	30,29	14,60	41,90	28,06	15,27	41,24	28,08
Bengkulu	13,50	41,99	27,46	12,71	39,15	25,67	13,42	41,36	27,11
Lampung	13,34	48,32	30,31	13,13	47,00	29,56	12,93	45,47	28,71
Kep. Bangka Belitung	11,33	49,01	29,35	11,88	47,51	28,92	12,43	50,76	30,76
Kepulauan Riau	11,97	47,11	29,10	12,10	47,73	29,47	12,99	47,67	29,90
DKI Jakarta	15,65	45,85	30,60	16,87	46,54	31,56	15,47	45,86	30,51
Jawa Barat	14,69	58,35	36,22	14,54	58,03	35,99	14,06	55,96	34,73
Jawa Tengah	15,13	41,67	28,64	15,80	42,49	29,39	14,77	43,00	29,14
DI Yogyakarta	21,03	42,91	32,22	20,71	40,29	30,73	20,85	38,71	29,98
Jawa Timur	14,53	44,92	30,11	14,80	44,22	29,88	15,50	44,79	30,51
Banten	15,09	48,13	31,28	13,36	50,11	31,38	13,00	51,37	31,81
Bali	15,45	30,58	23,02	14,55	27,62	21,09	15,05	28,87	21,97
Nusa Tenggara Barat	16,26	46,20	32,05	15,93	41,96	29,65	15,29	44,15	30,51
Nusa Tenggara Timur	17,42	38,12	28,06	15,94	33,67	25,05	15,83	38,86	27,66
Kalimantan Barat	13,22	39,60	26,14	14,40	40,32	27,09	13,37	41,54	27,16
Kalimantan Tengah	10,72	41,28	25,25	12,56	43,73	27,37	13,76	45,85	29,01
Kalimantan Selatan	13,92	45,12	29,44	13,94	42,43	28,12	13,18	45,12	29,07
Kalimantan Timur	10,26	56,30	31,84	11,22	52,14	30,40	9,33	52,29	29,46
Sulawesi Utara	14,91	53,87	34,07	15,30	56,12	35,37	15,42	54,77	34,77
Sulawesi Tengah	12,66	44,83	28,38	12,43	44,73	28,21	12,43	47,24	29,43
Sulawesi Selatan	16,63	55,20	36,81	17,23	53,92	36,42	17,17	52,56	35,69
Sulawesi Tenggara	14,97	45,53	30,39	15,76	44,81	30,42	15,41	44,49	30,08
Gorontalo	14,84	55,91	35,51	16,25	54,84	35,67	14,35	49,68	32,12
Sulawesi Barat	13,34	37,77	25,68	14,91	40,01	27,59	13,99	38,07	26,16
Maluku	19,06	46,56	32,83	18,10	45,68	31,91	19,55	46,14	32,87
Maluku Utara	16,42	49,20	32,48	15,50	49,38	32,10	16,47	50,34	33,06
Papua Barat	18,94	43,04	30,15	19,31	46,05	31,75	18,93	46,48	31,74
Papua	10,82	31,32	20,48	11,44	29,08	19,75	12,68	29,39	20,55
Indonesia	14,68	47,33	31,04	14,88	46,64	30,79	14,69	46,74	30,74

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013	Nov 2012	Feb 2013	Mei 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57,85	57,57	56,84	29,32	29,89	30,18	12,83	12,54	12,98
Sumatera Utara	60,37	59,93	58,79	31,19	31,52	32,19	8,44	8,55	9,02
Sumatera Barat	60,09	60,21	59,35	28,93	28,46	28,95	10,98	11,33	11,71
Riau	57,92	58,64	57,80	31,36	30,23	31,06	10,72	11,13	11,15
Jambi	65,36	65,30	63,01	23,89	23,72	25,87	10,75	10,98	11,12
Sumatera Selatan	65,77	65,93	67,96	25,64	25,69	24,24	8,59	8,38	7,80
Bengkulu	63,80	65,19	63,88	25,73	24,41	26,55	10,47	10,41	9,56
Lampung	70,92	69,73	69,37	22,18	23,23	23,98	6,90	7,03	6,64
Kep. Bangka Belitung	67,11	64,67	66,10	26,97	27,55	26,47	5,92	7,78	7,43
Kepulauan Riau	45,90	47,22	46,41	39,25	37,83	39,33	14,85	14,95	14,26
DKI Jakarta	34,36	33,19	32,70	43,32	44,95	44,09	22,32	21,85	23,21
Jawa Barat	66,84	66,07	66,23	25,15	25,28	25,40	8,02	8,66	8,37
Jawa Tengah	73,35	73,29	72,67	19,52	19,75	20,53	7,13	6,96	6,79
DI Yogyakarta	50,42	47,52	48,84	33,28	35,57	32,76	16,30	16,91	18,40
Jawa Timur	70,12	69,55	69,48	21,89	22,24	21,76	7,99	8,21	8,77
Banten	60,25	58,41	58,18	27,32	29,05	28,80	12,43	12,54	13,03
Bali	57,73	57,54	56,76	30,11	29,50	30,02	12,16	12,96	13,21
Nusa Tenggara Barat	69,14	71,03	69,54	21,75	20,41	21,65	9,10	8,56	8,82
Nusa Tenggara Timur	79,24	79,09	79,02	13,93	14,10	14,62	6,83	6,81	6,37
Kalimantan Barat	76,15	74,74	73,74	17,84	18,24	18,93	6,01	7,02	7,32
Kalimantan Tengah	71,94	71,06	70,31	19,32	19,82	20,17	8,74	9,12	9,52
Kalimantan Selatan	72,40	73,05	73,53	20,37	20,09	18,43	7,23	6,86	8,03
Kalimantan Timur	49,91	50,71	49,55	35,97	35,21	37,30	14,13	14,08	13,15
Sulawesi Utara	58,70	57,52	59,32	31,66	31,49	30,53	9,64	11,00	10,15
Sulawesi Tengah	65,84	66,82	65,62	23,09	21,90	23,27	11,07	11,28	11,11
Sulawesi Selatan	64,91	65,27	63,22	22,22	22,32	23,70	12,87	12,42	13,08
Sulawesi Tenggara	61,87	61,87	61,23	23,72	23,45	23,79	14,41	14,68	14,98
Gorontalo	71,30	71,18	71,14	19,78	18,94	17,91	8,92	9,88	10,95
Sulawesi Barat	74,27	73,66	74,16	17,69	18,81	18,89	8,04	7,52	6,95
Maluku	60,88	59,46	58,76	27,97	27,93	29,77	11,15	12,61	11,46
Maluku Utara	60,34	58,85	58,12	28,11	29,51	29,38	11,55	11,65	12,49
Papua Barat	58,67	56,90	58,13	29,13	30,90	30,29	12,20	12,20	11,58
Papua	74,96	75,20	74,86	18,82	18,51	18,06	6,22	6,29	7,08
Indonesia	65,44	65,00	64,64	25,02	25,28	25,47	9,54	9,72	9,89

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 275 990	841 604	1 186 844	1 245 174	806 742	1 151 414	1 258 239	807 286	1 167 033
2	3 254 185	3 087 105	3 244 787	3 411 456	1 743 368	3 314 664	3 411 985	2 254 436	3 352 590
3	1 542 058	1 118 611	1 380 187	1 523 430	1 074 754	1 353 754	1 573 564	1 131 296	1 409 098
4	2 527 935	1 913 019	2 451 527	2 337 013	1 837 681	2 280 295	2 037 438	1 910 238	2 023 159
5	1 568 394	2 185 673	1 587 910	1 548 548	2 442 073	1 583 840	1 549 833	1 904 571	1 567 812
6	1 334 498	1 139 127	1 257 229	1 312 506	1 059 820	1 213 547	1 335 010	1 092 290	1 238 419
7	1 766 232	2 397 578	1 829 064	1 939 499	2 731 892	2 016 394	1 862 926	2 352 235	1 917 813
8	2 292 779	2 341 658	2 304 945	2 314 766	2 453 457	2 351 996	2 445 601	2 551 147	2 475 160
9	2 177 539	1 558 330	1 870 527	2 207 291	1 615 265	1 916 658	2 174 136	1 593 628	1 890 972
Total	1 789 436	1 401 611	1 652 263	1 799 845	1 409 200	1 661 674	1 812 606	1 427 717	1 675 728

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 483 538	1 082 929	1 186 844	1 336 170	1 088 784	1 151 414	1 313 360	1 118 263	1 167 033
2	4 446 836	1 929 471	3 244 787	4 447 661	1 937 113	3 314 664	4 566 537	1 893 876	3 352 590
3	1 476 560	1 159 113	1 380 187	1 438 660	1 156 745	1 353 754	1 494 213	1 184 638	1 409 098
4	2 730 652	1 525 922	2 451 527	2 474 237	1 580 425	2 280 295	2 166 631	1 586 108	2 023 159
5	1 734 166	1 341 267	1 587 910	1 734 218	1 302 486	1 583 840	1 704 107	1 314 547	1 567 812
6	1 322 930	989 278	1 257 229	1 269 285	982 573	1 213 547	1 301 146	988 235	1 238 419
7	1 983 148	1 343 048	1 829 064	2 191 573	1 422 991	2 016 394	2 058 066	1 473 999	1 917 813
8	2 457 297	1 541 566	2 304 945	2 525 153	1 463 893	2 351 996	2 645 975	1 489 014	2 475 160
9	1 958 873	1 669 881	1 870 527	2 024 416	1 679 033	1 916 658	1 993 455	1 654 461	1 890 972
Total	1 792 011	1 355 169	1 652 263	1 805 573	1 354 210	1 661 674	1 816 131	1 363 511	1 675 728

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(rupiah)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 689 688	1 533 855	1 641 819	1 708 306	1 546 058	1 654 659	1 721 586	1 561 722	1 667 122
Sumatera Utara	1 634 086	1 359 943	1 548 077	1 665 284	1 368 450	1 572 150	1 683 992	1 370 481	1 582 867
Sumatera Barat	1 832 081	1 688 237	1 771 794	1 869 386	1 661 076	1 785 819	1 869 826	1 688 917	1 798 587
Riau	2 024 545	1 621 661	1 911 423	2 023 681	1 633 334	1 914 546	2 040 777	1 651 277	1 930 449
Jambi	1 598 635	1 316 508	1 506 788	1 591 487	1 340 814	1 511 661	1 605 930	1 354 329	1 523 987
Sumatera Selatan	1 607 485	1 416 836	1 543 994	1 651 845	1 420 495	1 571 972	1 672 382	1 425 138	1 588 915
Bengkulu	1 787 980	1 505 419	1 682 398	1 799 106	1 522 114	1 693 306	1 824 821	1 542 073	1 710 124
Lampung	1 379 541	1 194 365	1 312 553	1 366 828	1 172 615	1 299 472	1 378 498	1 174 680	1 310 680
Kep. Bangka Belitung	1 769 502	1 308 457	1 624 484	1 824 094	1 356 951	1 678 659	1 841 003	1 366 912	1 690 144
Kepulauan Riau	2 518 504	1 937 828	2 309 745	2 559 118	2 000 245	2 361 330	2 581 243	2 028 155	2 388 768
DKI Jakarta	2 440 058	1 901 324	2 236 639	2 466 370	1 926 438	2 264 050	2 488 387	1 940 330	2 269 805
Jawa Barat	1 772 289	1 445 484	1 666 521	1 768 019	1 438 947	1 663 361	1 781 577	1 463 029	1 677 134
Jawa Tengah	1 477 725	1 075 250	1 307 895	1 475 355	1 069 595	1 309 478	1 481 844	1 073 212	1 320 408
DI Yogyakarta	1 621 627	1 291 501	1 490 194	1 670 829	1 331 887	1 528 716	1 696 578	1 342 207	1 552 869
Jawa Timur	1 484 746	1 090 869	1 332 050	1 490 875	1 115 084	1 342 775	1 514 254	1 120 830	1 360 710
Banten	2 069 189	1 621 949	1 914 315	2 076 716	1 619 177	1 916 511	2 102 935	1 644 908	1 948 570
Bali	1 782 758	1 475 229	1 662 481	1 768 291	1 473 372	1 653 608	1 792 815	1 499 250	1 670 532
Nusa Tenggara Barat	1 671 202	1 180 666	1 498 539	1 682 782	1 194 380	1 500 807	1 699 186	1 217 386	1 527 361
Nusa Tenggara Timur	1 661 420	1 550 842	1 625 975	1 678 132	1 567 595	1 638 158	1 683 815	1 570 795	1 648 004
Kalimantan Barat	1 653 139	1 341 076	1 568 468	1 666 902	1 390 426	1 585 237	1 672 250	1 376 683	1 594 157
Kalimantan Tengah	1 902 381	1 672 513	1 842 211	1 929 686	1 699 513	1 866 535	1 933 376	1 722 371	1 874 832
Kalimantan Selatan	1 810 456	1 455 247	1 711 973	1 848 628	1 452 167	1 741 014	1 871 173	1 467 033	1 761 138
Kalimantan Timur	2 453 904	1 775 280	2 279 466	2 507 966	1 804 123	2 320 725	2 528 139	1 827 726	2 329 342
Sulawesi Utara	1 789 074	1 806 667	1 794 899	1 816 057	1 864 899	1 832 064	1 838 230	1 887 826	1 855 313
Sulawesi Tengah	1 714 457	1 496 201	1 637 700	1 765 551	1 480 621	1 663 250	1 820 609	1 462 422	1 688 217
Sulawesi Selatan	1 807 300	1 508 919	1 694 507	1 825 762	1 491 464	1 695 889	1 853 121	1 506 634	1 714 806
Sulawesi Tenggara	1 901 103	1 548 939	1 777 107	1 918 034	1 583 863	1 797 934	1 940 290	1 604 705	1 812 724
Gorontalo	1 585 834	1 416 169	1 510 980	1 579 923	1 414 579	1 507 358	1 587 586	1 440 142	1 521 062
Sulawesi Barat	1 627 769	1 279 985	1 503 920	1 618 686	1 271 516	1 497 155	1 639 090	1 287 804	1 506 044
Maluku	1 935 397	1 864 285	1 911 406	1 954 787	1 834 471	1 910 963	1 965 922	1 850 802	1 922 408
Maluku Utara	2 028 961	1 816 690	1 964 126	2 029 058	1 813 671	1 963 201	2 054 800	1 845 914	1 987 443
Papua Barat	2 211 000	2 005 790	2 156 013	2 192 895	2 068 660	2 160 796	2 229 065	2 086 462	2 187 580
Papua	2 749 949	1 992 719	2 563 784	2 744 904	1 992 026	2 553 870	2 761 875	2 034 281	2 569 276
Indonesia	1 789 436	1 401 611	1 652 263	1 799 845	1 409 200	1 661 674	1 812 606	1 427 717	1 675 728

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,
2012–2013
(rupiah)

Provinsi	November 2012			Februari 2013			Mei 2013		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 855 432	1 492 533	1 641 819	1 866 116	1 493 185	1 654 659	1 881 611	1 506 600	1 667 122
Sumatera Utara	1 612 785	1 422 108	1 548 077	1 635 041	1 452 010	1 572 150	1 641 670	1 455 462	1 582 867
Sumatera Barat	1 937 970	1 576 595	1 771 794	1 947 673	1 591 618	1 785 819	1 948 541	1 600 575	1 798 587
Riau	2 211 771	1 560 683	1 911 423	2 196 282	1 611 460	1 914 546	2 212 899	1 623 097	1 930 449
Jambi	1 708 788	1 367 575	1 506 788	1 722 391	1 381 183	1 511 661	1 740 710	1 387 997	1 523 987
Sumatera Selatan	1 760 602	1 292 095	1 543 994	1 779 672	1 308 659	1 571 972	1 791 468	1 331 237	1 588 915
Bengkulu	1 898 314	1 469 185	1 682 398	1 920 519	1 452 749	1 693 306	1 966 980	1 465 598	1 710 124
Lampung	1 543 161	1 162 424	1 312 553	1 535 830	1 142 543	1 299 472	1 548 144	1 150 669	1 310 680
Kep. Bangka Belitung	1 715 172	1 484 874	1 624 484	1 763 809	1 550 150	1 678 659	1 774 341	1 575 194	1 690 144
Kepulauan Riau	2 377 863	1 710 881	2 309 745	2 429 871	1 704 676	2 361 330	2 426 934	1 964 347	2 388 768
DKI Jakarta	2 236 639	-	2 236 639	2 264 050	-	2 264 050	2 269 805	-	2 269 805
Jawa Barat	1 777 112	1 264 487	1 666 521	1 775 353	1 252 310	1 663 361	1 778 524	1 256 841	1 677 134
Jawa Tengah	1 375 874	1 202 612	1 307 895	1 393 988	1 176 052	1 309 478	1 406 166	1 180 811	1 320 408
DI Yogyakarta	1 536 969	1 347 477	1 490 194	1 571 513	1 399 487	1 528 716	1 593 471	1 411 489	1 552 869
Jawa Timur	1 439 587	1 101 348	1 332 050	1 452 246	1 118 360	1 342 775	1 474 541	1 138 277	1 360 710
Banten	2 036 080	1 328 313	1 914 315	2 056 316	1 311 431	1 916 511	2 073 061	1 328 591	1 948 570
Bali	1 751 148	1 459 651	1 662 481	1 738 713	1 463 673	1 653 608	1 743 661	1 473 950	1 670 532
Nusa Tenggara Barat	1 647 677	1 318 721	1 498 539	1 643 789	1 318 091	1 500 807	1 667 142	1 340 715	1 527 361
Nusa Tenggara Timur	1 811 781	1 486 995	1 625 975	1 842 403	1 476 189	1 638 158	1 855 287	1 484 419	1 648 004
Kalimantan Barat	1 676 357	1 466 540	1 568 468	1 720 978	1 449 182	1 585 237	1 748 399	1 453 760	1 594 157
Kalimantan Tengah	2 155 313	1 619 161	1 842 211	2 142 784	1 644 091	1 866 535	2 163 974	1 657 170	1 874 832
Kalimantan Selatan	1 830 068	1 579 649	1 711 973	1 837 576	1 623 165	1 741 014	1 830 686	1 677 057	1 761 138
Kalimantan Timur	2 383 031	2 018 444	2 279 466	2 432 937	2 021 460	2 320 725	2 435 458	2 021 478	2 329 342
Sulawesi Utara	1 874 322	1 686 455	1 794 899	1 931 796	1 690 209	1 832 064	1 957 389	1 689 790	1 855 313
Sulawesi Tengah	1 773 161	1 526 320	1 637 700	1 837 244	1 522 488	1 663 250	1 862 157	1 546 814	1 688 217
Sulawesi Selatan	1 964 821	1 410 738	1 694 507	1 969 637	1 398 349	1 695 889	1 976 668	1 398 487	1 714 806
Sulawesi Tenggara	2 023 109	1 554 052	1 777 107	2 040 483	1 581 093	1 797 934	2 048 773	1 589 701	1 812 724
Gorontalo	1 683 379	1 277 239	1 510 980	1 700 399	1 260 823	1 507 358	1 710 531	1 271 377	1 521 062
Sulawesi Barat	1 604 550	1 425 379	1 503 920	1 616 166	1 409 094	1 497 155	1 618 882	1 420 151	1 506 044
Maluku	2 010 595	1 766 985	1 911 406	2 025 767	1 753 956	1 910 963	2 034 067	1 750 390	1 922 408
Maluku Utara	2 211 110	1 787 117	1 964 126	2 219 678	1 796 770	1 963 201	2 229 255	1 799 872	1 987 443
Papua Barat	2 299 572	2 049 125	2 156 013	2 352 639	2 037 419	2 160 796	2 360 445	2 042 770	2 187 580
Papua	2 668 833	2 408 074	2 563 784	2 674 035	2 370 982	2 553 870	2 661 373	2 421 548	2 569 276
Indonesia	1 792 011	1 355 169	1 652 263	1 805 573	1 354 210	1 661 674	1 816 131	1 363 511	1 675 728

Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id

